



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



# GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

LAPORAN GFS STRATEGIS  
TINGKAT WILAYAH



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**REPUBLIK INDONESIA**

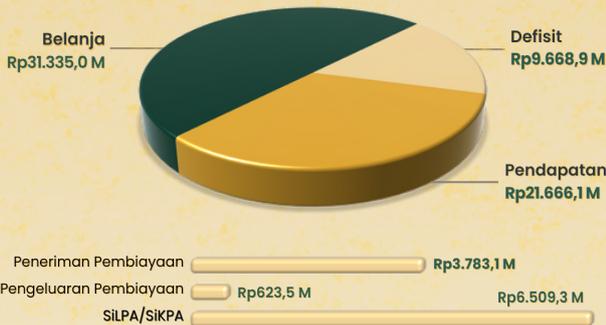
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH  
dan  
LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024**

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
2024**

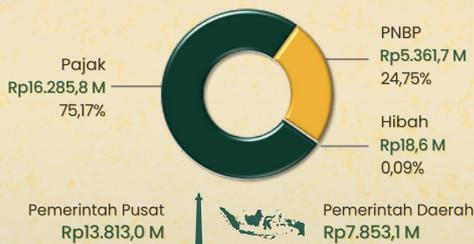
**LKPK-TW** Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian - Tingkat Wilayah

Laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) dalam suatu periode.

**Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian**



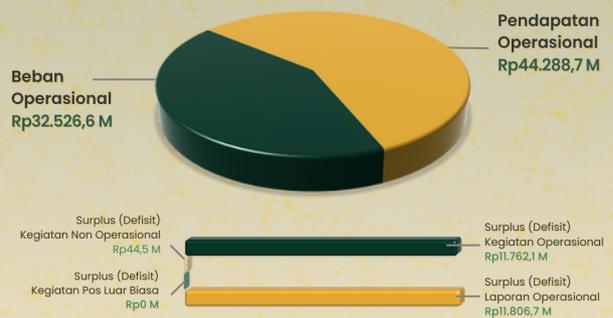
**Komposisi Pendapatan Konsolidasian**



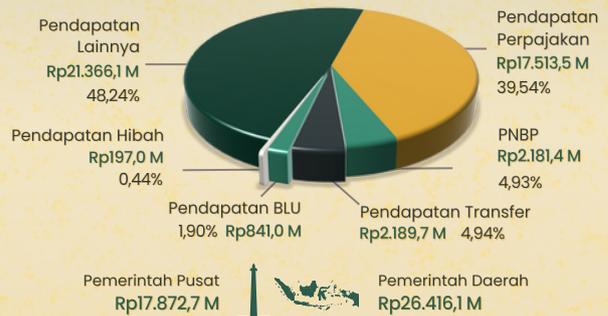
**Komposisi Belanja Konsolidasian**



**Laporan Operasional Konsolidasian**



**Pendapatan Operasional Konsolidasian**



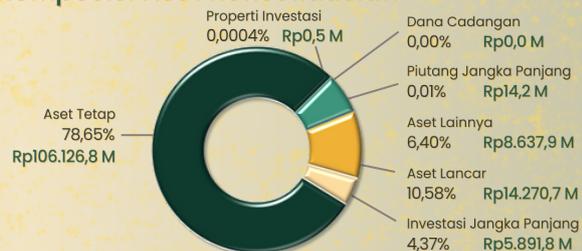
**Beban Operasional Konsolidasian**



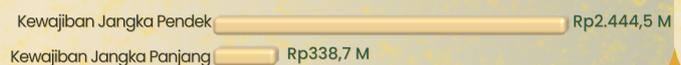
**Neraca Konsolidasian**



**Komposisi Aset Konsolidasian**



**Komposisi Kewajiban Konsolidasian**



Laporan Statistik Keuangan Pemerintah - Tingkat Wilayah **LSKP-TW**

Laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb selama suatu periode.

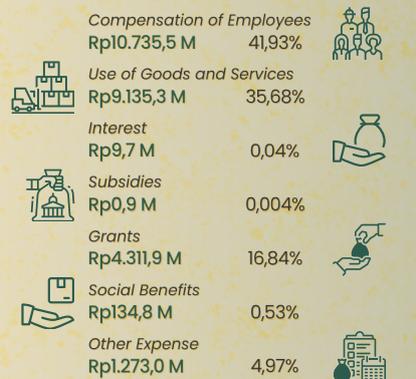
Laporan Operasional Statistik



Tren Revenue (Pendapatan)



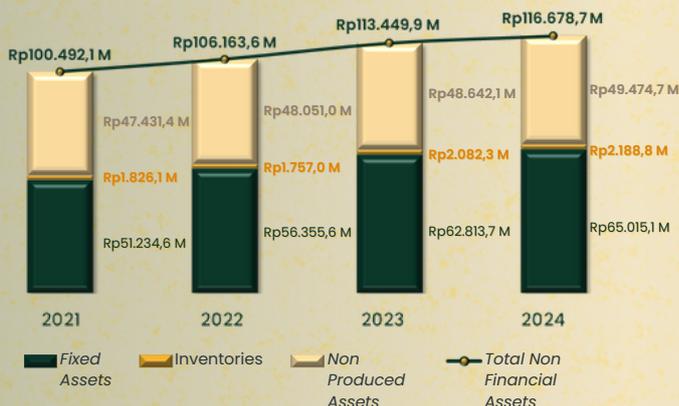
Komposisi Expense (Beban/Belanja Operasional)



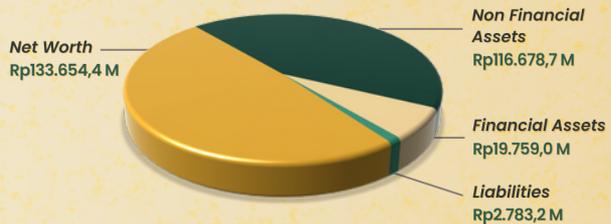
Komposisi Assets



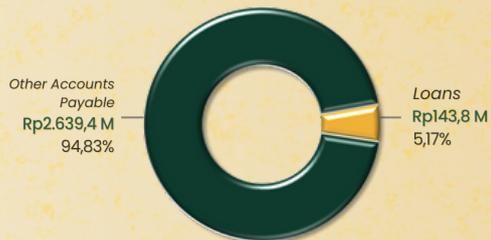
Tren Non Financial Assets



Neraca Statistik



Komposisi Liabilities



Komposisi Net Worth



## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
<i>Flash Report</i> .....	1
1. Gambaran Umum Kondisi Keuangan LKPP-TW, LKPKD-TW, LKPK-TW, dan LSKP-TW Provinsi Kalimantan Selatan Periode Triwulan III Tahun 2024 .....	1
2. Perkembangan Kondisi Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan .....	3
3. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Berdampak pada Kinerja Keuangan dan Statistik.....	5
4. <i>Resume</i> Pelaksanaan Kegiatan .....	5
5. Kesimpulan dan Rekomendasi .....	9
Daftar Lampiran .....	11
<i>Face</i> Laporan.....	12
Metadata .....	39
Analisis Rasio Keuangan.....	42

## FLASH REPORT LAPORAN GFS STRATEGIS TINGKAT WILAYAH PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2024

### 1. Gambaran Umum Kondisi Keuangan LKPP-TW, LKPKD-TW, LKPK-TW, dan LSKP-TW Provinsi Kalimantan Selatan Periode Triwulan III Tahun 2024

#### a. LKPP-TW

Kinerja realisasi pendapatan Pemerintah Pusat pada periode Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp13,81 triliun tercatat menurun 17,60% dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2023. Seluruh komponen Pendapatan mengalami penurunan, kecuali Pendapatan PNBP Lainnya yang mengalami peningkatan 10,24% dan Pendapatan BLU yang meningkat tipis 0,07%. Penurunan realisasi Pendapatan utamanya dipengaruhi oleh menurunnya Pajak Penghasilan sebesar Rp2,04 triliun atau 22,36% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp27,56 triliun mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 29,20%. Seluruh pos belanja mengalami peningkatan realisasi, kecuali Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar 3,04% (yoy) dan Dana Transfer Khusus Fisik dengan penurunan 9,50%. Posisi aset di neraca LKPP-TW per 30 September 2024 sebesar Rp52,56 triliun mengalami kenaikan sebesar 7,77% dibandingkan dengan posisi neraca per 31 Desember 2023 karena terdapat peningkatan pada Kas dan Setara Kas, utamanya dari Kas Lainnya dan Setara Kas dan kas pada BLU.

#### b. LKPKD-TW

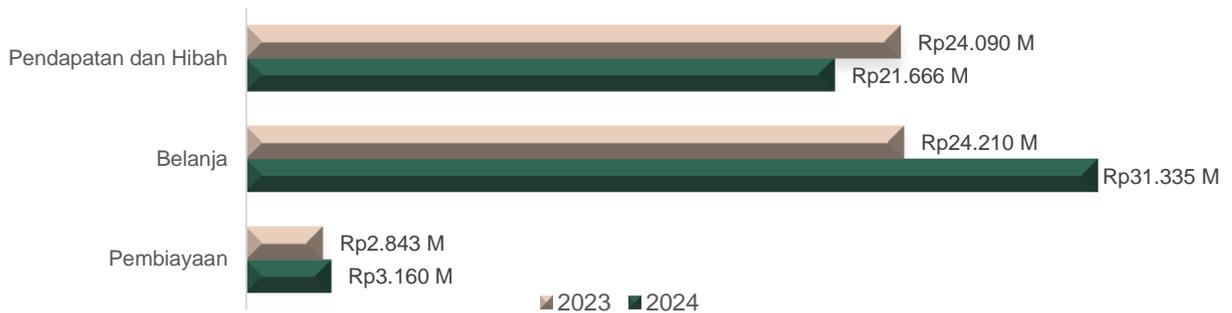
Di sisi LKPKD-TW, pendapatan daerah konsolidasian sampai dengan 30 September 2024 menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp27,42 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 26,61% (yoy). Komponen pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah secara nominal mencapai Rp5,65 triliun, pendapatan dari dana transfer sebesar Rp21,74 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp41,10 miliar. Kontribusi pendapatan transfer masih dominan terhadap pendapatan daerah pada APBD. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan APBD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendapatan transfer untuk pendanaan pembangunan daerah di Kalimantan Selatan masih tinggi. Jumlah PAD pada Triwulan III Tahun 2024 mengalami peningkatan tipis sebesar 3,30% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar terdapat pada komponen Retribusi Daerah, yaitu sebesar 532,06% (yoy) atau senilai Rp539 miliar. Kenaikan Retribusi Daerah tersebut utamanya berasal dari peningkatan signifikan (yoy) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 3.994,90% atau senilai Rp505 miliar dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 1.994,54% atau senilai Rp22,26 miliar. Belanja Daerah juga menunjukkan kinerja yang positif dengan realisasi Rp20,98 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 35,37% dari periode yang sama Tahun 2023.

#### c. LKPK-TW

Hasil konsolidasi dari LKPP-TW dan LKPKD-TW menghasilkan realisasi LKPK-TW Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapatan konsolidasian tingkat wilayah Kalimantan Selatan mencapai Rp21,66 triliun. Sebesar 75,17% dari realisasi pendapatan merupakan kontribusi dari Pendapatan Perpajakan, terutama Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri. Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari Perpajakan mencapai Rp16,05 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp5,36 triliun. Namun demikian, nilai

pendapatan konsolidasian mengalami penurunan dari periode yang sama Tahun 2023 yang disumbang oleh penurunan pendapatan pada tingkatan Pemerintah Pusat, terutama sektor perpajakan. Proporsi tertinggi Pendapatan Perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp7,09 triliun, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp4,23 triliun, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp689 miliar. Realisasi Belanja konsolidasian juga menunjukkan akselerasi dengan realisasi pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp31,33 triliun. Realisasi terbesar merupakan Belanja Pegawai sebesar Rp10,73 triliun. Berikut merupakan grafik perbandingan komposisi LRA LKPK-TW Triwulan III Tahun 2024 dengan periode Triwulan III Tahun 2023.

Grafik 1. Perbandingan Komposisi LRA LKPK-TW Kalimantan Selatan

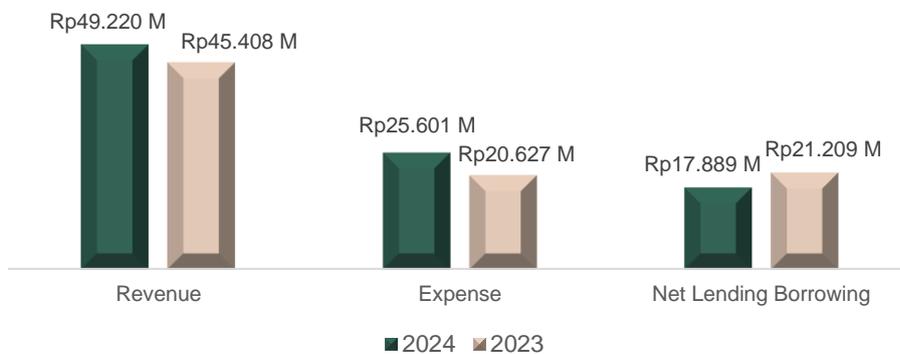


Sumber: Diolah dari LRA LKPK Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 Prov. Kalimantan Selatan

#### d. LSKP-TW

Dari LSKP-TW Kalimantan Selatan, realisasi pendapatan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp49,22 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 8,39% (yoy). Seluruh komponen realisasi pendapatan mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali Pendapatan Pajak. Sementara itu, beban statistik tercatat Rp25,60 triliun atau meningkat sebesar 24,11% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kompensasi Pegawai menjadi yang terbesar, yaitu sebesar Rp10,73 triliun sampai dengan 30 September 2024. Dari sisi neraca statistik, *Net Worth* atau Kekayaan Bersih tercatat sebesar Rp133,65 triliun, yang terdiri atas Aset Non Keuangan sebesar Rp116,68 triliun dan Aset Keuangan sebesar Rp19,76 triliun. Nilai *Net Worth* per 30 September 2024 mengalami peningkatan tipis sebesar 4,28% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Berikut merupakan grafik perbandingan komposisi LO LSKP-TW Triwulan III tahun 2024 dengan periode Triwulan III tahun 2023.

Grafik 2. Perbandingan Komposisi LO LSKP-TW Kalimantan Selatan



Sumber: Diolah dari LRA LKPK Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 Prov. Kalimantan Selatan

## 2. Perkembangan Kondisi Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan

### a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)

Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPK Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 583,79%, yang berasal dari perhitungan aset lancar sebesar Rp14,27 triliun dan kewajiban jangka pendek sebesar Rp2,44 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di tingkat konsolidasian memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, di mana ketersediaan aset lancar sebesar 5 kali lebih tinggi daripada kewajiban jangka pendeknya. Sementara itu, Rasio Solvabilitas Jangka Panjang adalah sebesar 39.837,92%, yang berasal dari perhitungan total aset sebesar Rp134,94 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp338,72 miliar. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah di tingkat konsolidasian sangat baik untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya.

### b. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 19,38% dan 23,59%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Triwulan III Tahun 2024 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya karena terdapat penurunan PAD, khususnya Lain-lain PAD yang Sah.

#### 2. Rasio Solvabilitas Anggaran

Rasio Solvabilitas Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 137,89% dan 137,35%. Rasio Solvabilitas Anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka menutupi belanja pemerintah. Nilai di atas 100% tersebut mencerminkan bahwa Pendapatan Pemerintah Daerah lingkup provinsi Kalimantan Selatan mampu menutupi belanja Pemerintah selama periode anggaran berkenaan.

#### 3. Rasio Solvabilitas Layanan

Rasio Solvabilitas Layanan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024 sebesar 10.070.416 yang berarti untuk setiap kebutuhan pelayanan menurut fungsi dan jenis pelayanan yang akan diterima oleh per 1 orang penduduk di wilayah layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dipenuhi/dijamin dengan nilai aset yang digunakan untuk pelayanan publik senilai Rp10.070.416. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9.003.156.

#### 4. Rasio Solvabilitas Operasional

Rasio Solvabilitas Operasional ini dihitung dengan membandingkan Total Pendapatan LO-DAK LO dibagi dengan Beban Operasi LO. Rasio Solvabilitas Operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 130,18% dan 162,34%. Secara umum, nilai tersebut mencerminkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2024, Pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menutupi belanja operasional selama periode anggaran.

5. Rasio Fleksibilitas Keuangan

Rasio Fleksibilitas Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 29,49% dan 60,90%. Nilai Rasio Fleksibilitas Keuangan yang bernilai positif tersebut mencerminkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan setelah dikurangi DAK dapat mencukupi untuk membiayai kebutuhan utama, yaitu pembayaran beban operasional dan pembayaran pokok utang. Hal ini disebabkan beban operasional lebih besar dari pendapatan operasional setelah dikurangi dengan pendapatan transfer DAK dan pembayaran pokok kewajiban.

c. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

Analisis Keseimbangan Fiskal menunjukkan bahwa kesinambungan fiskal Pemerintah Konsolidasian sangat terjaga dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator Keseimbangan Operasi Neto/Bruto (*Net/Bruto Operating Balance*). Perubahan kekayaan selama transaksi berjalan menunjukkan penurunan di seluruh tingkatan pemerintahan, kecuali pemerintah kabupaten/kota apabila dibandingkan dengan periode Triwulan III Tahun 2023. Jumlah akumulasi NOB yaitu sebesar Rp23,62 triliun.

2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

a. Pajak Langsung (*Direct Taxes*)

Pajak Langsung (*Direct Taxes*) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp6,23 triliun. Pajak Langsung sebagian besar berupa *Taxes on income, profits, and capital gain*. Pajak Langsung Lainnya berupa Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Langsung (*Direct Taxes*) mengalami penurunan pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp2,47 triliun atau 28,43% dibanding Triwulan III Tahun 2023. Penurunan tersebut berasal penurunan penerimaan pajak pada Pemerintah Pusat.

b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*)

Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp9,88 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp309 miliar atau 3,04% dibandingkan Triwulan III Tahun 2023, yaitu sebesar Rp10,19 triliun. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*) sebagian besar berupa *Taxes on Good Services* yaitu mencapai 96,94% dari total Pajak Tidak Langsung. Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Provinsi didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pada Pemkab/Pemkot didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan.

c. Pajak Modal (*Capital Taxes*)

Pajak Modal (*Capital Taxes*) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp163,06 miliar yang mengalami peningkatan sebesar Rp15,37 miliar atau sebesar 10,41% dibandingkan Triwulan III Tahun 2023. Pajak Modal (*Capital Taxes*) hanya terdapat pada Pemkab/Pemkot yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

d. Belanja Konsumsi Final Pemerintah (*Government Final Consumption Expenditure*)

Belanja Konsumsi Final Pemerintah pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah Rp18,67 triliun yang mengalami peningkatan sebesar Rp3,74 triliun atau 25,08% dibandingkan Triwulan III Tahun 2023. Peningkatan Belanja Konsumsi Final Pemerintah terbesar disumbang oleh Penggunaan Barang dan Jasa (*Use of Goods and Services*), yaitu meningkat sebesar Rp1,92 triliun atau 26,61% (yoy).

e. Tabungan Bruto (*Gross Saving*)

Tabungan Bruto (*Gross Saving*) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp23,63 triliun yang mengalami penurunan sebesar Rp1,14 triliun atau 4,62% dibandingkan Triwulan III Tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan perlunya peningkatan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan Tabungan Bruto yang dapat dialokasikan untuk dilakukan investasi melalui optimalisasi pembiayaan.

3. Analisis Indikator Pembiayaan

Total Pembiayaan (*Total Financing*) merupakan nilai yang sama dengan *Net Lending/Net Borrowing*. Nilai *Net Lending* Triwulan III Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp17,88 triliun. Dengan demikian, nilai *Net Lending* mengalami penurunan sebesar Rp3,32 triliun atau 15,65% dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023, yaitu sebesar Rp21,21 triliun. Penurunan nilai *Net Lending* dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada seluruh tingkatan pemerintahan, kecuali pemerintah kabupaten/kota.

3. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Berdampak pada Kinerja Keuangan dan Statistik

a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Pusat

Kebijakan akuntansi dari pengelola akuntansi unit eselon 1 terkait penerapan PSAP 17 Properti Investasi belum seluruhnya ada sehingga UAPPA-W dan satker di bawahnya belum dapat mengimplementasikan PSAP 17 Properti Investasi tersebut dalam laporan keuangannya.

b. Permasalahan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah

1. Aplikasi SIPD RI belum sepenuhnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah (khususnya LRA per Fungsi). Fitur yang tersedia masih pada tahap penganggaran sehingga proses penatausahaan dan akuntansi pelaporan belum dapat dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan *update* sistem aplikasi untuk mengakomodasi penyusunan LRA per Fungsi. Kemudian, diperlukan juga bimtek dari Kemendagri untuk pengoperasian aplikasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penerapan PSAP 17 Properti Investasi belum sepenuhnya diaplikasikan pada seluruh pemerintah daerah lingkup Kalimantan Selatan. Terdapat 2 dari 14 pemerintah daerah yang menyajikan pos aset Properti Investasi pada LKPD Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh belum adanya revisi kebijakan terkait aset tetap menjadi properti investasi melalui peraturan kepala daerah.
3. Belum terdapat pos dan akun Properti Investasi pada aplikasi SIPD RI sehingga pemerintah daerah harus melakukan perhitungan manual dalam memasukkan pos Properti Investasi pada neraca LKPD.

4. Resume Pelaksanaan Kegiatan

a. Publikasi GFS Triwulan II Tahun 2024 pada Kegiatan *Treasury Goes to Campus* (TGTC) Politeknik Negeri Banjarmasin

Dalam rangka mengenalkan APBN sekaligus statistik keuangan pemerintah kepada civitas akademika, Kanwil DJPb melaksanakan kegiatan *Treasury Goes to Campus* (TGTC) Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) pada Rabu, 24 Juli 2024. Peserta kegiatan TGTC tersebut adalah mahasiswa Poliban. Publikasi GFS Triwulan II Tahun 2024 tingkat wilayah

Kalimantan Selatan disampaikan oleh Kepala Bidang PAPP Kanwil DJPb Kalsel. Pada kesempatan ini pula, disampaikan materi tentang Kajian Fiskal Regional Kalimantan Selatan oleh Bidang PPA II. Dengan adanya publikasi GFS pada kegiatan TGTC, diharapkan dapat meningkatkan *awareness* civitas akademika, khususnya mahasiswa, mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah secara keseluruhan di tingkat wilayah Kalimantan Selatan.



Pembukaan kegiatan TGTC di Poliban



Publikasi GFS Triwulan II Tahun 2024 oleh Kabid PAPP

**b. Koordinasi Data LRA Pemda dan Sharing Session Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan dengan BPKAD se-Kalimantan Selatan**

Koordinasi ini dilaksanakan pada hari Rabu, 11 September 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan akurasi data LRA Pemda yang digunakan untuk menyusun ALCo tiap bulan sekaligus untuk mengetahui kendala dan permasalahan terkait aplikasi SIPD RI Kemendagri dan SIKD DJPK dari sisi Pemda. Selain itu, koordinasi data dengan Pemda ini juga bermanfaat untuk memastikan akurasi data LRA Pemda yang digunakan untuk penyusunan GFS pada periode Triwulan III Tahun 2024.

Dari keseluruhan 14 Pemda, terdapat 10 Pemda yang hadir secara daring dalam kegiatan koordinasi data tersebut. Simpulan dari kegiatan tersebut di antaranya adalah Pemda lingkup Kalimantan Selatan akan melakukan pengecekan ulang antara LRA yang telah dikirimkan dengan LRA dari data linktree GFS yang bersumber dari SIKD DJPK yang kemudian diolah dengan Dit. APK. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang akan digunakan dalam penyusunan Laporan ALCo dan sekaligus sebagai data GFS pada periode triwulanan kedepannya. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi forum rutin antara Pemda khususnya BPKAD dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan andal.

Koordinasi Data LRA Pemda

**c. Publikasi GFS Triwulan II Tahun 2024 pada *Treasury Corner* Universitas Lambung Mangkurat (ULM)**

Publikasi GFS Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan pada Kamis, 22 Agustus 2024 di Area *Treasury Corner* Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melalui sosialisasi dan dialog kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat. Pada publikasi GFS ini, Kanwil DJPb Kalsel berkolaborasi dengan Kanwil DJKN Kalselteng yang membahas pengelolaan aset negara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi pengelolaan aset negara serta kondisi keuangan dan ekonomi secara komprehensif di Kalimantan Selatan melalui Laporan GFS. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman civitas akademika, khususnya mahasiswa, terhadap peran dan kondisi keuangan regional Kalimantan Selatan.



Penyampaian materi GFS oleh Kabid PAK Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan



Sosialisasi pengelolaan aset negara oleh Kabid PKN Kanwil DJKN Kalselteng

**d. Publikasi GFS Triwulan II Tahun 2024 pada FGD Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Lingkup Prov. Kalimantan Selatan**

Dalam rangka peningkatan peran Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) dan *Financial Advisor* (FA), dilaksanakan FGD Pengelolaan Anggaran Pemda yang mengundang Sekretaris Daerah dan Pimpinan BPKAD se-Kalimantan Selatan sebagai peserta. Kegiatan dilakukan di Aula S. Parman Kanwil DJPb Kalsel pada Selasa, 8 Oktober 2024. Pada kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel menyampaikan kepada peserta FGD mengenai GFS Tahun 2023 *Audited*, serta GFS Triwulan II Tahun 2024 yang menggambarkan gabungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan 30 Juni 2024.

Pada kegiatan ini pula, diserahkan buku GFS *Audited* 2023 untuk tiap Pemda sebagai bentuk apresiasi kepada Pemda yang telah menyampaikan data laporan keuangan sekaligus untuk penyebarluasan informasi mengenai laporan keuangan konsolidasian dan statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemda dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan dalam penyediaan data LK Pemda yang nantinya data tersebut diolah dan dapat dimanfaatkan kembali oleh Pemda untuk meng-*capture* kondisi keuangan wilayah secara komprehensif.

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024



Penyampaian publikasi GFS oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan



Penyerahan buku GFS *Audited* 2023 secara simbolis oleh Kakanwil DJPb Kalsel kepada Pemprov. Kalsel

**e. Publikasi GFS Triwulan II Tahun 2024 di KPPN dan Pemda lingkup Kalimantan Selatan**

Dalam rangka edukasi dan publikasi GFS, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan melakukan permintaan penayangan GFS Triwulan II Tahun 2024 pada KPPN dan Pemda. Publikasi GFS pada KPPN dilakukan dengan penayangan *dashboard* GFS Triwulan II Tahun 2024 melalui *virtual banner* di *front office* sehingga *stakeholders* KPPN yang berkunjung dapat mengakses informasi terkait GFS. Publikasi GFS pada videotron maupun situs resmi Pemda juga diharapkan dapat meluaskan informasi GFS kepada masyarakat. Bukti dukung publikasi GFS dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/PublikasiGFSTW2Kalsel> .



Penayangan GFS Triwulan II 2024 pada *virtual banner* KPPN Barabai



Penayangan GFS Triwulan II 2024 di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

**f. Publikasi GFS pada Media Massa**



Untuk memperluas jangkauan informasi statistik keuangan daerah Kalimantan Selatan kepada masyarakat, kegiatan publikasi GFS pada FGD Pengelolaan Anggaran Pemda juga dilakukan melalui media massa. Bekerja sama dengan kantor berita Antara, Kanwil DJPb Kalsel mengenalkan konsep GFS yang menunjukkan kondisi keuangan daerah secara komprehensif.

- 1) <https://kalsel.antaranews.com/berita/434442/kalsel-integrasikan-info-keuangan-pusat-dan-daerah-lewat-gfs> 2)
- 2) <https://www.antaranews.com/berita/4392574/djpb-kekayaan-pemerintah-di-kalsel-mencapai-rp128-triliun>

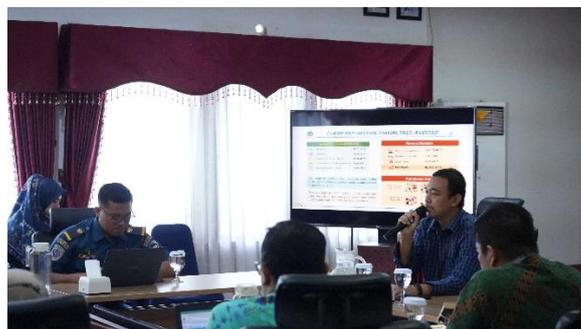
**g. Publikasi GFS periode *Audited* 2023 dan Triwulan II Tahun 2024 pada *Workshop* Penyusunan LK UAPPA-W dan BLU Periode Triwulan III 2024**

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 10 Oktober 2024 bertempat di Aula Lantai II Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan informasi terkait penyusunan laporan keuangan periode Triwulan III Tahun 2024 serta mempublikasikan GFS *Audited* 2023 dan *update* GFS Triwulan II Tahun 2024.

Peserta dalam kegiatan ini adalah 33 UAPPA-W dan 4 BLU lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, serta Tim Vera/VeraKI KPPN lingkup Kalimantan Selatan. Dengan adanya publikasi GFS kepada satker UAPPA-W dan BLU, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait peran data keuangan Pemerintah Pusat di daerah yang membentuk laporan konsolidasian tingkat wilayah.



Publikasi GFS Triwulan II Tahun 2024 oleh Kepala Seksi ASPLK



Penyampaian materi publikasi GFS Periode *Audited* Tahun 2023

**5. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan data keuangan daerah konsolidasian pada Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Periode Triwulan III Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pendapatan menunjukkan penurunan sebesar 10,06% (yoy). Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp13,81 triliun menurun sebesar 17,60% (yoy) yang dikontribusikan oleh penurunan Pajak Dalam Negeri, terutama Pajak Penghasilan. Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan pertumbuhan positif mencapai Rp27,42 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 26,61% (yoy). Kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah pada APBD masih menjadi yang terbesar pada APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari sisi LSKP-TW Kalimantan Selatan, seluruh komponen realisasi Pendapatan mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali komponen Pendapatan Pajak yang mengalami penurunan sebesar 14,55% (yoy). Hal ini merupakan dampak dari menurunnya Pendapatan Pajak Penghasilan di sisi LKPP dan Pajak Daerah. *Net Worth* atau Kekayaan Bersih Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp133,65 triliun, yang terdiri atas Aset Non Keuangan sebesar Rp116,68 triliun, Aset Keuangan sebesar Rp19,76 triliun, dan Kewajiban sebesar Rp2,78 triliun.

Berdasarkan analisis laporan keuangan Triwulan III tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rasio kemandirian daerah tertinggi yaitu sebesar 47,28%, dengan kategori “baik” (*range* 40% s.d. 50%). Kabupaten Balangan memiliki rasio kemandirian terendah, yaitu 3,97% dengan kategori “sangat kurang” (*range* 0% s.d. 10%). Rata-rata rasio kemandirian daerah pemerintah daerah lingkup provinsi Kalimantan Selatan sebesar 19,38% atau dalam kategori “kurang” (*range* 10% s.d. 20%). Hal ini menunjukkan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan masih memerlukan bantuan Pemerintah Pusat untuk melakukan pembiayaan kegiatan

pembangunan di daerah. Berdasarkan kondisi laporan keuangan dan statistik provinsi Kalimantan Selatan periode Triwulan III Tahun 2024, berikut disampaikan rekomendasi *policy response* di wilayah Kalimantan Selatan.

- a. Pemerintah Daerah didorong untuk segera melakukan revisi kebijakan akuntansi aset tetap terkait dengan diberlakukannya PSAP 17 sehingga pemanfaatan dan penatausahaan aset Properti Investasi dapat optimal dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pemerintah Daerah dapat menggali potensi pajak kendaraan bermotor dan retribusi dari sektor penjualan produksi usaha daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari pos pajak dan retribusi daerah yang mengalami tren kenaikan pada Triwulan III Tahun 2024 (yoy).
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu *melakukan* reviu belanja untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) terutama meningkatkan belanja modal untuk mempercepat *multiplier effect* bagi perekonomian regional.
- d. Diperlukan sistem informasi keuangan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat akses data kapanpun diperlukan, untuk kepentingan analisis dan pengambilan keputusan manajerial.

## Daftar Lampiran Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Periode Triwulan III Tahun 2024

1. LRA, LO, dan Neraca LKPK-TW Triwulan III Tahun 2024, yang dilengkapi dengan:
  - a. *Face* LRA, LO, dan Neraca LKPP-TW
  - b. *Face* LRA, LO, dan Neraca LKPK-TW
2. LO dan Neraca LSKP-TW Triwulan III Tahun 2024, yang dilengkapi dengan:
  - a. *Face* LO dan Neraca LSKPP-TW
  - b. *Face* LO dan Neraca LSKPK-TW
3. Dokumen pendukung ( terlampir pada tautan <https://s.id/lkpk-lskp-tw> )
  - a. LKPD atau data informasi keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah
  - b. Kertas Kerja *Excel input* data Pemerintah Daerah
  - c. Kertas Kerja *Excel Eliminasi*
4. Metadata
5. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah dan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH PUSAT  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30  
SEPTEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>13.812.992.370.327</b>	<b>16.762.700.206.650</b>	<b>-17,60%</b>
<b>A.1</b>	<b>Pendapatan Perpajakan</b>	<b>12.379.193.893.393</b>	<b>15.427.265.995.702</b>	<b>-19,76%</b>
1	Penerimaan Dalam Negeri	12.144.976.447.393	15.042.651.997.702	-19,26%
2	Pajak Perdagangan Internasional	234.217.446.000	384.613.998.000	-39,10%
<b>A.2</b>	<b>Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>1.433.798.476.934</b>	<b>1.335.434.210.948</b>	<b>7,37%</b>
1	Penerimaan Sumber Daya Alam	-	-	0,00%
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-	0,00%
3	Pendapatan PNBP Lainnya	1.056.082.683.749	957.972.209.416	10,24%
4	Pendapatan BLU	377.715.793.185	377.462.001.532	0,07%
<b>A.3</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1	Hibah	-	-	0,00%
<b>B</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>27.558.224.049.509</b>	<b>21.329.150.686.886</b>	<b>29,20%</b>
<b>B.1</b>	<b>Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah</b>	<b>6.490.182.823.209</b>	<b>5.614.711.187.845</b>	<b>15,59%</b>
1	Belanja Pegawai	3.101.868.134.095	2.675.240.360.046	15,95%
2	Belanja Barang	2.732.408.944.671	2.266.436.074.529	20,56%
3	Belanja Modal	641.573.389.943	661.666.659.827	-3,04%
4	Belanja Bantuan Sosial	14.332.354.500	11.368.093.443	26,08%
<b>B.2</b>	<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>21.068.041.226.300</b>	<b>15.714.439.499.041</b>	<b>34,07%</b>
<b>1</b>	<b>Transfer Ke Daerah</b>	<b>19.688.552.655.110</b>	<b>14.551.516.349.350</b>	<b>35,30%</b>
	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>17.300.029.555.375</b>	<b>12.221.026.076.919</b>	<b>41,56%</b>
1.1	Transfer Dana Bagi Hasil	10.392.499.816.092	6.207.103.790.870	67,43%
1.2	Transfer Dana Alokasi Umum	6.907.529.739.283	6.013.922.286.049	14,86%
	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>2.388.523.099.735</b>	<b>2.330.490.272.431</b>	<b>2,49%</b>
1.4	Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	529.570.973.235	585.135.447.205	-9,50%
1.5	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.678.394.968.000	1.671.307.833.226	0,42%
<b>2</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>180.557.158.500</b>	<b>74.046.992.000</b>	<b>143,84%</b>
<b>3</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>1.379.488.571.190</b>	<b>1.162.923.149.691</b>	<b>18,62%</b>
<b>C</b>	<b>Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)</b>	<b>(13.745.231.679.182)</b>	<b>(4.566.450.480.236)</b>	<b>-201,00%</b>
<b>D</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>E</b>	<b>SILPA (SIKPA)</b>	<b>(13.745.231.679.182)</b>	<b>(4.566.450.480.236)</b>	<b>-201,00%</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30  
SEPTEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A</b>	<b>Pendapatan Pemerintah Daerah</b>	<b>27.424.749.507.341</b>	<b>21.660.542.926.758</b>	<b>26,61%</b>
<b>A.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.647.600.345.959</b>	<b>5.467.308.753.223</b>	<b>3,30%</b>
1	Pajak Daerah	3.906.589.477.168	3.631.220.609.666	7,58%
2	Retribusi Daerah	640.311.837.063	101.305.688.424	532,06%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	218.619.023.075	202.530.376.248	7,94%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	882.080.008.653	1.532.252.078.885	-42,43%
<b>A.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>21.736.050.043.603</b>	<b>16.154.870.555.343</b>	<b>34,55%</b>
<b>1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>20.552.204.939.113</b>	<b>15.328.882.495.026</b>	<b>34,08%</b>
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	422.457.006.154	670.323.458.303	-36,98%
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	11.954.758.709.257	7.339.088.994.339	62,89%
1.3	Dana Alokasi Umum	6.573.328.465.849	5.857.026.094.706	12,23%
1.4	Dana Alokasi Khusus	1.601.660.757.853	1.462.443.947.678	9,52%
<b>2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>	<b>1.171.028.216.390</b>	<b>784.516.159.405</b>	<b>49,27%</b>
2.1	Dana Penyesuaian	-	-	0,00%
2.2	Dana Insentif Daerah	162.370.292.500	69.359.540.000	134,10%
2.3	Dana Desa	1.008.657.923.890	715.156.619.405	41,04%
<b>3</b>	<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi</b>	<b>-</b>	<b>41.471.900.912</b>	<b>-100,00%</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	41.471.900.912	-100,00%
<b>4</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>12.816.888.100</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>41.099.117.779</b>	<b>38.363.618.192</b>	<b>7,13%</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>18.592.850.056</b>	<b>38.326.462.694</b>	<b>-51,49%</b>
<b>2</b>	<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>22.506.267.723</b>	<b>37.155.498</b>	<b>60473,18%</b>
<b>B</b>	<b>Belanja Pemerintah Daerah</b>	<b>20.979.211.570.800</b>	<b>15.497.780.701.916</b>	<b>35,37%</b>
<b>B.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>15.875.506.907.619</b>	<b>12.550.808.123.229</b>	<b>26,49%</b>
1	Belanja Pegawai	7.626.323.739.774	6.672.521.354.622	14,29%
2	Belanja Barang dan Jasa	6.732.099.381.606	5.232.275.960.267	28,66%
3	Belanja Bunga	9.737.133.634	17.061.439.141	-42,93%
4	Subsidi	923.353.066	536.027.600	72,26%
5	Hibah	1.385.914.086.739	543.212.623.368	155,13%
6	Bantuan Sosial	120.509.212.800	85.200.718.231	41,44%
<b>B.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>5.092.232.779.994</b>	<b>2.921.630.288.281</b>	<b>74,29%</b>
1	Belanja Modal Tanah	77.229.791.464	156.284.742.259	-50,58%

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	742.286.005.467	467.666.907.845	58,72%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.379.272.149.651	772.372.915.098	78,58%
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	2.790.876.661.667	1.442.960.151.921	93,41%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.469.501.943	35.501.196.331	50,61%
6	Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	19.996.650	-	100,00%
7	Belanja Modal Aset Lainnya	9.002.491.140	15.810.374.744	-43,06%
8	Belanja Modal BLUD	40.076.182.012	31.034.000.083	29,14%
<b>B.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>11.471.883.187</b>	<b>25.342.290.406</b>	<b>-54,73%</b>
1	Belanja Tak Terduga	11.471.883.187	25.342.290.406	-54,73%
<b>C</b>	<b>Transfer</b>	<b>2.369.226.076.550</b>	<b>1.716.752.428.349</b>	<b>38,01%</b>
<b>C.1</b>	<b>Transfer/Bagi Hasil ke Desa</b>	<b>93.991.180.093</b>	<b>29.947.664.681</b>	<b>213,85%</b>
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	89.753.995.638	23.837.984.841	276,52%
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.237.184.455	6.109.679.840	-30,65%
<b>C.2</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>2.275.234.896.457</b>	<b>1.686.804.763.668</b>	<b>34,88%</b>
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	14.518.643.700	2.477.219.772	486,09%
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.260.716.252.757	1.684.327.543.896	34,22%
3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	0,00%
<b>D</b>	<b>Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)</b>	<b>4.076.311.859.991</b>	<b>4.446.009.796.493</b>	<b>-8,32%</b>
<b>E</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>3.159.606.832.904</b>	<b>2.843.081.182.260</b>	<b>11,13%</b>
<b>E.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>3.783.097.576.808</b>	<b>3.447.096.839.967</b>	<b>9,75%</b>
1	Penggunaan SiLPA	3.753.095.895.672	3.413.353.612.750	9,95%
2	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000	-	100,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0,00%
4	Pinjaman Dalam Negeri	-	32.524.866.198	-100,00%
5	Penerimaan Kembali Piutang	1.681.136	1.218.361.019	-99,86%
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	0,00%
<b>E.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>623.490.743.904</b>	<b>604.015.657.707</b>	<b>3,22%</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	160.000.000.000	-87,50%
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	495.078.346.671	317.721.043.463	55,82%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	108.412.397.233	116.294.614.244	-6,78%
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	10.000.000.000	-100,00%
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	0,00%
<b>F.</b>	<b>Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)</b>	<b>7.235.918.692.895</b>	<b>7.289.090.978.753</b>	<b>-0,73%</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30  
SEPTEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>21.666.066.446.927</b>	<b>24.089.907.412.941</b>	<b>-10,06%</b>
<b>A.1</b>	<b>Pendapatan Perpajakan</b>	<b>16.285.783.370.561</b>	<b>19.058.486.605.368</b>	<b>-14,55%</b>
1	Pajak Dalam Negeri	16.051.565.924.561	18.673.872.607.368	-14,04%
2	Pajak Perdagangan Internasional	234.217.446.000	384.613.998.000	-39,10%
<b>A.2</b>	<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>5.361.690.226.310</b>	<b>4.993.094.344.879</b>	<b>7,38%</b>
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan negara Yang Dipisahkan	218.619.023.075	202.530.376.248	7,94%
2	PNBP Lainnya	2.064.449.686.264	1.377.867.268.788	49,83%
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	0,00%
4	Pendapatan Transfer	2.174.640.853.357	1.843.780.562.684	17,94%
5	Bantuan Keuangan	12.816.888.100	88.680.010.082	-85,55%
6	Pendapatan BLU	891.163.775.514	1.480.236.127.076	-39,80%
<b>A.3</b>	<b>Hibah</b>	<b>18.592.850.056</b>	<b>38.326.462.694</b>	<b>-51,49%</b>
1	Pendapatan Hibah	18.592.850.056	38.326.462.694	-51,49%
<b>B</b>	<b>Belanja dan Transfer Pemerintah</b>	<b>31.334.986.266.120</b>	<b>24.210.348.096.684</b>	<b>29,43%</b>
<b>B.1</b>	<b>Belanja Pempus/Pemda</b>	<b>27.469.394.394.009</b>	<b>21.112.491.889.761</b>	<b>30,11%</b>
1	Belanja Pegawai	10.728.191.873.869	9.347.761.714.668	14,77%
2	Belanja Barang dan Jasa	9.464.508.326.277	7.498.712.034.796	26,22%
3	Belanja Modal	5.733.806.169.937	3.583.296.948.107	60,01%
4	Pembayaran Bunga Utang	9.737.133.634	17.061.439.141	-42,93%
5	Subsidi	923.353.066	536.027.600	72,26%
6	Hibah	1.385.914.086.739	543.212.623.368	155,13%
7	Belanja Bantuan Sosial	134.841.567.300	96.568.811.674	39,63%
8	Belanja Lain-Lain (Belanja tak Terduga)	11.471.883.187	25.342.290.406	-54,73%
<b>B.2</b>	<b>Transfer- Transfer Antar Pemda</b>	<b>3.865.591.872.111</b>	<b>3.097.856.206.923</b>	<b>24,78%</b>
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	93.991.180.093	29.947.664.681	213,85%
2	Transfer Bantuan Keuangan	2.275.234.896.457	1.686.804.763.668	34,88%
3	Transfer Pempus ke Pemda dan Dana Desa	1.496.365.795.561	1.381.103.778.574	8,35%
<b>C</b>	<b>Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)</b>	<b>(9.668.919.819.193)</b>	<b>(120.440.683.743)</b>	<b>-7927,95%</b>
<b>D</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>3.159.606.832.904</b>	<b>2.843.081.182.260</b>	<b>11,13%</b>
<b>D.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>3.783.097.576.808</b>	<b>3.447.096.839.967</b>	<b>9,75%</b>
1	Penggunaan SILPA TA Sebelumnya	3.753.095.895.672	3.413.353.612.750	9,95%

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
2	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000	-	100,00%
3	Hasil Penjualan Keayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0,00%
4	Pinjaman Dalam Negeri		32.524.866.198	-100,00%
5	Penerimaan Kembali Piutang	1.681.136	1.218.361.019	-99,86%
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	0,00%
<b>D.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>623.490.743.904</b>	<b>604.015.657.707</b>	<b>3,22%</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	160.000.000.000	-87,50%
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	495.078.346.671	317.721.043.463	55,82%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	108.412.397.233	116.294.614.244	-6,78%
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	10.000.000.000	-100,00%
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	0,00%
<b>E</b>	<b>E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - (D + C)</b>	<b>(6.509.312.986.289)</b>	<b>2.722.640.498.516</b>	<b>-339,08%</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
PEMERINTAH PUSAT  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024  
DAN 30 SEPTEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>A.1</b>	<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>36.438.708.959.248</b>	<b>32.630.735.045.004</b>	<b>11,67%</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	<b>13.606.925.501.142</b>	<b>15.566.930.175.614</b>	<b>-12,59%</b>
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	6.917.148.488.011	9.154.846.011.751	-24,44%
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	4.813.047.835.298	4.487.759.402.837	7,25%
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	1.599.719.591.011	1.491.217.780.808	7,28%
1.4	Pendapatan Cukai	4.053.694.000	1.113.237.000	264,14%
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	64.246.698.822	61.160.324.267	5,05%
1.6	Pendapatan Bea Masuk	35.340.356.000	121.905.930.000	-71,01%
1.7	Pendapatan Bea Keluar	173.368.838.000	248.945.844.000	-30,36%
1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain	-	(18.355.049)	100,00%
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>1.287.643.776.502</b>	<b>1.318.553.253.816</b>	<b>-2,34%</b>
2.1	Pendapatan BLU	327.574.362.247	394.203.027.326	-16,90%
2.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	960.069.414.255	924.350.226.490	3,86%
<b>3</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>178.438.447.914</b>	<b>4.935.554.998</b>	<b>3515,37%</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN PENYESUAIAN</b>	<b>21.365.701.233.690</b>	<b>15.740.316.060.576</b>	<b>35,74%</b>
4.1	Pendapatan <i>Dropping</i> Dana Transfer	21.365.701.233.690	15.740.316.060.576	35,74%
<b>A.2</b>	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>28.346.259.609.199</b>	<b>21.797.865.535.443</b>	<b>30,04%</b>
1	Beban Pegawai	3.295.812.574.133	2.855.604.728.471	15,42%
2	Beban Persediaan	294.532.142.572	135.745.912.600	116,97%
3	Beban Barang dan Jasa	1.716.727.012.265	1.374.868.968.804	24,86%
4	Beban Pemeliharaan	279.147.850.180	262.441.267.680	6,37%
5	Beban Perjalanan Dinas	407.741.171.444	310.380.729.906	31,37%
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	217.732.485.396	338.837.502.819	-35,74%
7	Beban Bantuan Sosial	13.976.919.738	10.940.293.460	27,76%
8	Beban Lain-lain	22.111.800.000	-	100,00%
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	694.480.718.991	696.754.232.465	-0,33%
10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	38.295.700.790	71.975.838.662	-46,79%
11	Beban Transfer	21.365.701.233.690	15.740.316.060.576	35,74%
<b>A.3</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>8.092.449.350.049</b>	<b>10.832.869.509.561</b>	<b>-25,30%</b>

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>B</b>	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>44.544.290.993</b>	<b>22.040.071.560</b>	<b>102,11%</b>
<b>B.1</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>	<b>(4.370.559.639)</b>	<b>(13.934.219.317)</b>	<b>68,63%</b>
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.880.103.430	3.073.178.676	-6,28%
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	7.250.663.069	17.007.397.993	-57,37%
<b>B.2</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>35.974.290.877</b>	<b>-100,00%</b>
1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	37.424.700.464	-100,00%
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	1.450.409.587	-100,00%
<b>B.3</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>48.914.850.632</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
1	Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya	55.234.514.132	-	100,00%
2	Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya	6.319.663.500	-	100,00%
<b>C</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>	<b>8.136.993.641.042</b>	<b>10.854.909.581.121</b>	<b>-25,04%</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024  
DAN 30 SEPTEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>A.1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>26.416.091.583.450</b>	<b>20.945.386.307.355</b>	<b>26,12%</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.647.600.345.958</b>	<b>5.467.308.753.225</b>	<b>3,30%</b>
1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	3.906.589.477.168	3.631.220.609.667	7,58%
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	640.311.837.062	101.305.688.424	532,06%
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	218.619.023.075	202.530.376.248	7,94%
1.4	Lain-lain PAD yang sah-LO	882.080.008.653	1.532.252.078.886	-42,43%
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>20.727.392.119.713</b>	<b>15.439.713.935.938</b>	<b>34,25%</b>
<b>2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>20.552.204.939.113</b>	<b>15.328.882.495.026</b>	<b>34,08%</b>
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	422.457.006.154	670.323.458.303	-36,98%
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11.954.758.709.257	7.339.088.994.339	62,89%
2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.573.328.465.849	5.857.026.094.706	12,23%
2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.601.660.757.853	1.462.443.947.678	9,52%
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO</b>	<b>162.370.292.500</b>	<b>69.359.540.000</b>	<b>134,10%</b>
<b>2.3</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LO</b>	<b>-</b>	<b>41.471.900.912</b>	<b>-100,00%</b>
<b>2.4</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>12.816.888.100</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>41.099.117.779</b>	<b>38.363.618.192</b>	<b>7,13%</b>
3.1	Pendapatan Hibah	18.592.850.056	38.326.462.694	-51,49%
3.2	Pendapatan Lainnya	22.506.267.723	37.155.498	60473,18%
<b>A.2</b>	<b>BEBAN</b>	<b>22.746.424.711.891</b>	<b>14.652.789.198.953</b>	<b>55,24%</b>
<b>1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>20.377.198.635.341</b>	<b>12.936.036.770.604</b>	<b>57,52%</b>
1.1	Beban Pegawai	7.626.323.739.774	6.672.521.354.622	14,29%
1.2	Beban Barang dan Jasa	7.222.472.921.708	5.617.504.607.642	28,57%
1.3	Beban Bunga	9.737.133.634	17.061.439.141	-42,93%
1.4	Beban Subsidi	923.353.066	536.027.600	72,26%
1.5	Beban Hibah	1.385.914.086.739	543.212.623.368	155,13%
1.6	Beban Bantuan Sosial	120.509.212.800	85.200.718.231	41,44%
1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.011.318.187.620	-	100,00%
1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	-	0,00%
1.9	Beban Lain-lain	-	-	0,00%

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>2</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>2.369.226.076.550</b>	<b>1.716.752.428.349</b>	<b>38,01%</b>
2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	89.753.995.638	23.837.984.841	276,52%
2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.237.184.455	6.109.679.840	-30,65%
2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemda Lainnya	14.518.643.700	2.477.219.772	486,09%
2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.260.716.252.757	1.684.327.543.896	34,22%
2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	0,00%
<b>A.3</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>			
<b>B</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>B.1</b>	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1	Surplus penjualan aset non lancar	-	-	0,00%
2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	-	-	0,00%
3	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	0,00%
<b>B.2</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1	Defisit penjualan aset non lancar	-	-	0,00%
2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	-	-	0,00%
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	0,00%
<b>C</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>3.669.666.871.559</b>	<b>6.292.597.108.402</b>	<b>-41,68%</b>
<b>C.1</b>	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>C.2</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>3.669.666.871.559</b>	<b>6.292.597.108.402</b>	<b>-41,68%</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024  
DAN 30 SEPTEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>A.1</b>	<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>44.288.744.993.948</b>	<b>39.926.169.658.609</b>	<b>10,93%</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	<b>17.513.514.978.310</b>	<b>19.198.150.785.280</b>	<b>-8,77%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Pajak dalam Negeri</b>	<b>17.304.805.784.310</b>	<b>18.827.299.011.280</b>	<b>-8,09%</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	6.917.148.488.011	9.154.846.011.751	-24,44%
1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	4.813.047.835.298	4.487.759.402.837	7,25%
1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	1.599.719.591.011	1.491.217.780.808	7,28%
1.1.4	Pendapatan Cukai	4.053.694.000	1.113.237.000	264,14%
1.1.5	Pendapatan Perpajakan Pemda	3.906.589.477.168	3.631.220.609.666	7,58%
1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	64.246.698.822	61.141.969.218	5,08%
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO</b>	<b>208.709.194.000</b>	<b>370.851.774.000</b>	<b>-43,72%</b>
1.2.1	Pendapatan Bea Masuk	35.340.356.000	121.905.930.000	-71,01%
1.2.2	Pendapatan Bea Keluar	173.368.838.000	248.945.844.000	-30,36%
1.2.3	Reklasifikasi dari Pajak yang Belum Disetor Bendahara	-	-	0,00%
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>2.181.364.554.735</b>	<b>2.703.154.974.301</b>	<b>-19,30%</b>
<b>2.1</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan</b>	<b>218.619.023.075</b>	<b>202.530.376.248</b>	<b>7,94%</b>
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya – LO</b>	<b>1.962.745.531.660</b>	<b>2.500.624.598.053</b>	<b>-21,51%</b>
2.2.1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	47.450.955.606	20.771.846.546	128,44%
2.2.2	Pendapatan Jasa	735.290.691.433	212.308.481.582	246,33%
2.2.3	Pendapatan Bunga	126.073.331.426	107.262.769.843	17,54%
2.2.4	Pendapatan Pendidikan	-	3.488.580.000	-100,00%
2.2.5	Pendapatan Iuran dan Denda	94.300.726.239	129.850.559.656	-27,38%
2.2.6	Pendapatan Lain-lain	959.629.826.957	2.026.942.360.425	-52,66%
<b>3</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.189.670.997.369</b>	<b>1.846.900.801.825</b>	<b>18,56%</b>
<b>3.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO</b>	<b>2.171.602.811.457</b>	<b>1.802.308.661.772</b>	<b>20,49%</b>
3.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	206.768.371.033	-100,00%
3.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	2.171.602.811.457	1.595.540.290.739	36,10%
<b>3.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.3</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO</b>	<b>-</b>	<b>41.471.900.912</b>	<b>-100,00%</b>

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
3.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	-	41.471.900.912	-100,00%
<b>3.4</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>18.068.185.912</b>	<b>3.120.239.141</b>	<b>479,06%</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN BLU-LO</b>	<b>841.022.344.576</b>	<b>394.203.027.326</b>	<b>113,35%</b>
<b>5</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>197.031.297.970</b>	<b>43.262.017.692</b>	<b>355,44%</b>
<b>6</b>	<b>PENDAPATAN LAINNYA</b>	<b>21.366.140.820.988</b>	<b>15.740.498.052.185</b>	<b>35,74%</b>
<b>A.2</b>	<b>BEBAN OPERASIONAL DAN BEBAN TRANSFER</b>	<b>32.526.628.772.341</b>	<b>22.800.703.040.648</b>	<b>42,66%</b>
1	Beban Pegawai	10.922.136.313.907	9.528.126.083.093	14,63%
2	Beban Persediaan	294.535.269.272	135.753.743.356	116,96%
3	Beban Barang dan Jasa	9.843.818.314.293	7.904.025.246.095	24,54%
4	Beban Bunga	9.737.133.634	17.061.439.141	-42,93%
5	Beban Subsidi	923.353.066	536.027.600	72,26%
6	Beban Hibah	1.385.914.086.739	543.212.623.368	155,13%
7	Beban Bantuan Sosial	134.486.132.538	96.141.011.691	39,88%
8	Beban Lain-lain/Beban Tidak Terduga	22.111.800.000	-	100,00%
9	Beban Akrual Lainnya	4.744.094.607.401	768.730.071.127	517,13%
10	Beban Transfer	5.168.871.761.491	3.807.116.795.177	35,77%
<b>A.3</b>	<b>Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional (A.1 -A.2)</b>	<b>11.762.116.221.608</b>	<b>17.125.466.617.961</b>	<b>-31,32%</b>
<b>B</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
B.1	Surplus (Defisit) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.126	76	1381,58%
B.2	Surplus (Defisit) Pempus Pelepasan Aset Non Lancar	(4.370.559.639)	(13.934.219.317)	68,63%
B.3	Surplus (Defisit) Pempus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00%
B.4	Surplus (Defisit) Pempus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	48.914.849.506	35.974.290.801	35,97%
B.5	Surplus (Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar	-	-	0,00%
B.6	Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00%
B.7	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00%
<b>B.8</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>44.544.290.993</b>	<b>22.040.071.560</b>	<b>102,11%</b>
<b>C</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>11.806.660.512.601</b>	<b>17.147.506.689.521</b>	<b>-31,15%</b>
C.1	Pendapatan luar biasa	-	-	0,00%
C.2	Beban luar biasa	-	-	0,00%
<b>C.3</b>	<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>	<b>11.806.660.512.601</b>	<b>17.147.506.689.521</b>	<b>-31,15%</b>

**NERACA PEMERINTAH PUSAT  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A</b>	<b>ASET</b>	<b>52.560.422.455.024</b>	<b>48.772.476.315.305</b>	<b>7,77%</b>
<b>A.1</b>	<b>Aset lancar</b>	<b>5.427.462.363.261</b>	<b>3.512.719.835.270</b>	<b>54,51%</b>
<b>1</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>1.563.018.335.399</b>	<b>684.330.073.232</b>	<b>128,40%</b>
1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	46.541.181.717	193.789.035	23916,42%
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	204.657	149.292.000	-99,86%
1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	1.049.728.528.009	360.080.436.922	191,53%
1.4	Kas pada BLU	466.748.421.016	323.906.555.275	44,10%
<b>2</b>	<b>Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi dalam Deposito)</b>	<b>133.000.000.000</b>	<b>56.000.000.000</b>	<b>137,50%</b>
<b>3</b>	<b>Belanja dibayar di muka</b>	<b>5.203.323.637</b>	<b>8.065.649.953</b>	<b>-35,49%</b>
<b>4</b>	<b>Uang Muka Belanja</b>	<b>3.125.130</b>	<b>7.353.560</b>	<b>-57,50%</b>
<b>5</b>	<b>Pendapatan Yang Masih Harus Diterima</b>	<b>393.390.000</b>	<b>8.936.375.383</b>	<b>-95,60%</b>
<b>6</b>	<b>Piutang</b>	<b>2.183.171.491.813</b>	<b>1.319.192.447.674</b>	<b>65,49%</b>
6.1	Piutang Pajak	2.452.019.794.510	1.621.942.863.610	51,18%
6.2	Piutang Bukan Pajak	652.127.686.957	658.919.665.546	-1,03%
6.3	Bagian Lancar TP/TGR	-	-	0,00%
6.4	Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	185.595.000	-	100,00%
6.5	Piutang dari Kegiatan BLU	5.102.033.800	5.556.607.076	-8,18%
6.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(926.263.618.454)	(967.226.688.558)	4,24%
<b>7</b>	<b>Persediaan</b>	<b>1.542.503.185.942</b>	<b>1.436.187.935.468</b>	<b>7,40%</b>
<b>8</b>	<b>Persediaan yang Belum Diregister</b>	<b>169.511.340</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>A.3</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>46.786.161.230.109</b>	<b>44.895.398.557.306</b>	<b>4,21%</b>
1	Tanah	30.308.467.038.412	29.557.887.080.147	2,54%
2	Peralatan dan Mesin	7.838.605.537.133	7.500.898.778.693	4,50%
3	Gedung dan Bangunan	6.491.307.498.347	6.197.187.870.068	4,75%
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.473.061.705.682	15.636.126.323.119	11,75%
5	Aset Tetap Lainnya	315.511.542.926	274.061.194.187	15,12%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	825.023.685.508	1.181.033.675.096	-30,14%
7	Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	3.570.688.111	-	100,00%
8	Aset Konsesi Jasa	308.747.078.243	303.990.824.420	1,56%
9	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(16.778.133.544.253)	(15.755.787.188.424)	-6,49%
<b>A.4</b>	<b>Properti Investasi</b>	<b>541.964.775</b>	<b>550.176.362</b>	<b>-1,49%</b>
1	Properti Investasi	656.927.000	656.927.000	0,00%
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(114.962.225)	(106.750.638)	-7,69%

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A.5</b>	<b>Piutang Jangka Panjang</b>	<b>1.193.307.481</b>	<b>2.339.725.369</b>	<b>-49,00%</b>
1	Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	3.538.951.650	3.523.161.050	0,45%
2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(2.345.644.169)	(1.183.435.681)	-98,21%
<b>A.6</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>345.063.589.398</b>	<b>361.468.020.998</b>	<b>-4,54%</b>
1	Aset Tak Berwujud	220.967.197.015	87.857.923.887	151,51%
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1.232.708.191	220.858.355.438	-99,44%
3	Aset Lain-lain	391.374.500.034	271.592.926.705	44,10%
4	Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-	0,00%
5	Akumulasi Penyusutan	-	-	0,00%
5.1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(205.639.506.215)	(160.566.080.563)	-28,07%
5.2	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(62.871.309.627)	(58.275.104.469)	-7,89%
<b>B</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>1.248.827.732.363</b>	<b>1.256.003.737.171</b>	<b>-0,57%</b>
<b>B.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>962.759.763.809</b>	<b>968.341.792.173</b>	<b>-0,58%</b>
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	307.217.605.555	189.791.290.503	61,87%
2	Utang Transfer	300.726.739.643	3.066.732.253	9706,10%
3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	221.747.040.199	722.785.560.116	-69,32%
4	Uang Jangka Pendek Lainnya	23.954.520.169	88.065.007	27100,95%
5	Pendapatan Diterima Dimuka	109.011.474.208	52.518.739.294	107,57%
6	Hibah yang belum disahkan	-	-	0,00%
7	Uang Muka dari KPPN	102.384.035	91.405.000	12,01%
<b>B.2</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>286.067.968.554</b>	<b>287.661.944.998</b>	<b>-0,55%</b>
1	Kewajiban Konsesi Jasa	286.067.968.554	287.661.944.998	-0,55%
<b>C</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>51.311.594.722.661</b>	<b>47.516.472.578.134</b>	<b>7,99%</b>
<b>D</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>52.560.422.455.024</b>	<b>48.772.476.315.305</b>	<b>7,77%</b>

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**  
(Dalam Rupiah)

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A</b>	<b>ASET</b>	<b>82.381.539.356.633</b>	<b>80.757.854.073.521</b>	<b>2,01%</b>
<b>A.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>8.843.278.276.725</b>	<b>8.506.061.264.737</b>	<b>3,96%</b>
<b>1</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>7.329.541.375.551</b>	<b>6.992.324.363.563</b>	<b>4,82%</b>
1.1	Kas di Kas Daerah	6.290.536.470.036	6.421.771.085.486	-2,04%
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	135.067.703	145.786.858	-7,35%
1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.106.243.530	1.279.910.238	-13,57%
1.4	Kas di BLUD	708.780.364.850	524.410.055.424	35,16%
1.5	Kas Lainnya	328.983.229.432	44.717.525.557	635,69%
1.6	Setara Kas	-	-	0,00%
<b>2</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>1.410.230.944.555</b>	<b>1.410.230.944.555</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>23.424.363.327</b>	<b>23.424.363.327</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(567.056.347.425)</b>	<b>(567.056.347.425)</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>1.003.292.067</b>	<b>1.003.292.067</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Persediaan</b>	<b>646.134.648.650</b>	<b>646.134.648.650</b>	<b>0,00%</b>
<b>A.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.891.826.430.363</b>	<b>5.396.748.083.692</b>	<b>9,17%</b>
<b>1</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>619.453.134</b>	<b>619.453.134</b>	<b>0,00%</b>
1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	0,00%
1.2	Dana Bergulir	26.024.000	26.024.000	0,00%
1.3	Investasi Non Permanen Lainnya	593.429.134	593.429.134	0,00%
<b>2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>5.891.206.977.229</b>	<b>5.396.128.630.558</b>	<b>9,17%</b>
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.891.206.977.229	5.396.128.630.558	9,17%
2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	0,00%
<b>A.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>59.340.650.878.493</b>	<b>58.321.357.968.836</b>	<b>1,75%</b>
1	Tanah	19.154.493.836.699	19.077.264.045.235	0,40%
2	Peralatan dan Mesin	13.547.529.621.862	12.805.243.616.395	5,80%
3	Gedung dan Bangunan	23.518.334.101.688	22.139.061.952.037	6,23%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.759.379.424.297	39.981.045.772.195	6,95%
5	Aset Tetap Lainnya	1.024.398.801.133	970.929.299.190	5,51%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.453.093.409.353	1.453.073.412.703	0,00%
7	Akumulasi Penyusutan			
	Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan Mesin	(10.307.830.565.785)	(9.303.274.513.853)	-10,80%
	Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	(7.050.123.946.690)	(6.409.203.587.900)	-10,00%

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

No.	Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	Akumulasi Penyusutan-Jalan, Irigasi dan Jaringan	(24.724.600.721.094)	(22.363.466.903.232)	-10,56%
	Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	(34.023.082.970)	(29.315.123.934)	-16,06%
<b>A.4</b>	<b>Dana Cadangan</b>	<b>-</b>	<b>236.905.476.344</b>	<b>-100,00%</b>
<b>A.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>8.305.783.771.052</b>	<b>8.296.781.279.912</b>	<b>0,11%</b>
1	Tagihan Jangka Panjang	12.963.633.891	12.954.935.021	0,07%
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	274.146.247.557	274.120.473.912	0,01%
3	Aset Tidak Berwujud	312.098.041.172	311.586.514.577	0,16%
4	Aset Lain-lain	7.866.156.291.928	7.857.429.357.292	0,11%
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(159.580.443.496)	(159.310.000.890)	-0,17%
<b>B</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>1.534.397.991.429</b>	<b>1.642.810.388.662</b>	<b>-6,60%</b>
<b>B.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1.481.738.514.060</b>	<b>1.569.254.920.389</b>	<b>-5,58%</b>
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.981.422.317	5.981.422.317	0,00%
2	Utang Bunga	-	-	0,00%
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	91.174.638.128	178.691.044.457	-48,98%
4	Pendapatan Diterima Dimuka	17.579.094.413	17.579.094.413	0,00%
5	Utang Belanja	751.046.643.720	751.046.643.720	0,00%
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	615.956.715.482	615.956.715.482	0,00%
<b>B.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>52.659.477.369</b>	<b>73.555.468.273</b>	<b>-28,41%</b>
1	Utang Dalam Negeri	52.659.477.369	73.555.468.273	-28,41%
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	0,00%
<b>C</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>80.847.141.365.204</b>	<b>79.115.043.684.859</b>	<b>2,19%</b>
<b>D</b>	<b>JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN</b>	<b>82.381.539.356.633</b>	<b>80.757.854.073.521</b>	<b>2,01%</b>

**NERACA KONSOLIDASIAN  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>A</b>	<b>ASET</b>	<b>134.941.961.811.656</b>	<b>129.530.330.388.826</b>	<b>4,18%</b>
<b>A.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>14.270.740.639.985</b>	<b>12.018.781.100.007</b>	<b>18,74%</b>
<b>1</b>	<b>Kas dan Bank</b>	<b>8.892.559.710.949</b>	<b>7.676.654.436.795</b>	<b>15,84%</b>
1.1	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah / Kas di RKUD	6.290.536.470.036	6.421.771.085.486	-2,04%
1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	47.647.425.247	1.473.699.273	3133,19%
1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	135.272.360	295.078.858	-54,16%
1.4	Kas Lainnya dan Setara Kas	1.378.711.757.441	404.797.962.479	240,59%
1.5	Kas pada BLU	1.175.528.785.866	848.316.610.699	38,57%
<b>2</b>	<b>Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi dalam Deposito)</b>	<b>133.000.000.000</b>	<b>56.000.000.000</b>	<b>137,50%</b>
<b>3</b>	<b>Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja</b>	<b>7.775.446.282</b>	<b>19.184.986.411</b>	<b>-59,47%</b>
<b>6</b>	<b>Piutang</b>	<b>3.048.598.136.822</b>	<b>2.184.619.092.683</b>	<b>39,55%</b>
6.1	Piutang Pajak	2.452.019.794.510	1.621.942.863.610	51,18%
6.2	Piutang Bukan Pajak	2.062.358.631.512	2.069.150.610.101	-0,33%
6.3	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	3.948.998.276	3.948.998.276	0,00%
6.4	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	0,00%
6.5	Piutang lain-lain	23.590.678.403	23.859.656.679	-1,13%
6.6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1.493.319.965.879)	(1.534.283.035.983)	2,67%
<b>7.</b>	<b>Persediaan</b>	<b>2.188.807.345.932</b>	<b>2.082.322.584.118</b>	<b>5,11%</b>
<b>A.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>5.891.826.430.363</b>	<b>5.396.748.083.692</b>	<b>9,17%</b>
<b>1</b>	<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>619.453.134</b>	<b>619.453.134</b>	<b>0,00%</b>
1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	0,00%
1.2	Dana Bergulir	6.331.631.356	6.331.631.356	0,00%
1.3	Investasi Non Permanen Lainnya (Pinjaman kepada BUMN/D)	(5.712.178.222)	(5.712.178.222)	0,00%
<b>2</b>	<b>Investasi Permanen</b>	<b>5.891.206.977.229</b>	<b>5.396.128.630.558</b>	<b>9,17%</b>
2.1	Investasi Permanen PMN/D	5.891.206.977.229	5.396.128.630.558	9,17%
2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	0,00%
<b>A.3</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>106.126.812.108.602</b>	<b>103.216.756.526.142</b>	<b>2,82%</b>
1	Tanah	49.462.960.875.111	48.635.151.125.382	1,70%
2	Peralatan dan Mesin	21.386.135.158.995	20.306.142.395.088	5,32%

No	Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
3	Gedung dan Bangunan	30.009.641.600.035	28.336.249.822.105	5,91%
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	60.232.441.129.979	55.617.172.095.314	8,30%
5	Aset tetap lainnya	1.339.910.344.059	1.244.990.493.377	7,62%
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.278.117.094.861	2.634.107.087.799	-13,51%
7	Konsesi Jasa	308.747.078.243	303.990.824.420	1,56%
8	Aset Tetap yang Belum Diregister	3.570.688.111	-	100,00%
9	Akumulasi Penyusutan	(58.894.711.860.792)	(53.861.047.317.343)	-9,35%
	a. Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan Mesin	(16.563.750.425.617)	(15.306.576.614.479)	-8,21%
	b. Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	(8.227.964.489.631)	(7.491.218.883.916)	-9,83%
	c. Akumulasi Penyusutan-Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(34.005.183.345.141)	(30.975.883.227.826)	-9,78%
	d. Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	(67.318.822.560)	(62.959.875.183)	-6,92%
	e. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(30.494.777.843)	(24.408.715.939)	-24,93%
<b>A.4</b>	<b>Properti Investasi</b>	<b>541.964.775</b>	<b>550.176.362</b>	<b>-1,49%</b>
1	Properti Investasi	656.927.000	656.927.000	0,00%
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(114.962.225)	(106.750.638)	-7,69%
<b>A.4</b>	<b>Piutang Jangka Panjang</b>	<b>14.156.941.372</b>	<b>15.294.660.390</b>	<b>-7,44%</b>
1	Tagihan piutang penjualan angsuran	1.641.957.515	1.641.947.792	0,00%
2	Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	14.860.628.026	14.836.148.279	0,17%
3	Penyisihan piutang jangka panjang	(2.345.644.169)	(1.183.435.681)	-98,21%
<b>A.5</b>	<b>Dana Cadangan</b>	<b>-</b>	<b>236.905.476.344</b>	<b>-100,00%</b>
<b>A.6</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>8.637.883.726.559</b>	<b>8.645.294.365.889</b>	<b>-0,09%</b>
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	274.146.247.557	274.120.473.912	0,01%
2	Aset Tak Berwujud	533.065.238.187	399.444.438.464	33,45%
3	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	1.232.708.191	220.858.355.438	-99,44%
4	Aset Lain-lain	8.257.530.791.962	8.129.022.283.997	1,58%
5	Akumulasi Amortisasi	(428.091.259.338)	(378.151.185.922)	-13,21%
<b>B</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>2.783.225.723.792</b>	<b>2.898.814.125.833</b>	<b>-3,99%</b>
<b>B.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>2.444.498.277.869</b>	<b>2.537.596.712.562</b>	<b>-3,67%</b>
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.981.422.317	5.981.422.317	0,00%
2	Utang Kepada Pihak Ketiga	1.058.264.249.275	940.837.934.223	12,48%
3	Utang Bunga	-	-	0,00%
4	Utang Belanja	-	-	0,00%
5	Utang Transfer	300.726.739.643	3.066.732.253	9706,10%

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	91.174.638.128	178.691.044.457	-48,98%
7	Utang Yang Belum Ditagihkan	23.954.501.431	-	100,00%
8	Utang Jangka Pendek Lainnya	633.535.828.633	1.408.928.174.312	-55,03%
9	Uang Muka	102.384.035	91.405.000	12,01%
10	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	221.747.040.199	-	100,00%
11	Pendapatan Diterima Dimuka	109.011.474.208	-	100,00%
<b>B.2</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>338.727.445.923</b>	<b>361.217.413.271</b>	<b>-6,23%</b>
1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	52.659.477.369	73.555.468.273	-28,41%
2	Kewajiban Konsesi Jasa	286.067.968.554	287.661.944.998	-0,55%
<b>C</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>132.158.736.087.864</b>	<b>126.631.516.262.993</b>	<b>4,36%</b>
<b>D</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>134.941.961.811.656</b>	<b>129.530.330.388.826</b>	<b>4,18%</b>

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024  
DAN 30 SEPTEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan
<b>TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH:</b>				
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>41.368.336.316.406</b>	<b>38.088.777.374.860</b>	<b>8,61%</b>
1.1	Pajak	12.377.831.683.250	15.425.181.366.707	-19,76%
1.2	Kontribusi Sosial	-	-	0,00%
1.3	Hibah	4.000.000.000	3.343.970.000	19,62%
1.4	Pendapatan Lainnya	28.986.504.633.156	22.660.252.038.153	27,92%
<b>2</b>	<b>Beban</b>	<b>26.916.650.659.566</b>	<b>20.667.484.027.059</b>	<b>30,24%</b>
2.1	Kompensasi Pegawai	3.109.144.105.577	2.683.683.080.958	15,85%
2.2	Penggunaan Barang dan Jasa	2.451.549.365.137	2.049.833.933.998	19,60%
2.3	Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
2.4	Bunga	-	-	0,00%
2.5	Subsidi	-	-	0,00%
2.6	Hibah	21.068.041.226.300	15.714.439.499.041	34,07%
2.7	Manfaat Sosial	14.332.354.500	11.368.093.443	26,08%
2.8	Beban Lainnya	273.583.608.052	208.159.419.619	31,43%
<b>GOB</b>	<b>Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)</b>	<b>14.451.685.656.840</b>	<b>17.421.293.347.801</b>	<b>-17,05%</b>
<b>NOB</b>	<b>Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)</b>	<b>14.451.685.656.840</b>	<b>17.421.293.347.801</b>	<b>-17,05%</b>
<b>TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Akuisisi Aset Non Keuangan Neto</b>	<b>638.693.286.513</b>	<b>658.593.141.151</b>	<b>-3,02%</b>
3.1.1	Aset Tetap	629.379.131.090	656.310.148.756	-4,10%
3.1.2	Perubahan Persediaan	-	-	0,00%
3.1.3	Barang Berharga	-	-	0,00%
3.1.4	Aset Non Produksi	9.314.155.423	2.282.992.395	307,98%
<b>NLB</b>	<b>Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)</b>	<b>13.812.992.370.327</b>	<b>16.762.700.206.650</b>	<b>-17,60%</b>
<b>TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN):</b>				
<b>3.2</b>	<b>Akuisisi Neto Aset Keuangan</b>	<b>13.812.992.370.327</b>	<b>16.762.700.206.650</b>	<b>-17,60%</b>
3.2.1	Dalam Negeri	13.812.992.370.327	16.762.700.206.650	-17,60%
3.2.2	Luar Negeri	-	-	0,00%
<b>3.3</b>	<b>Keterjadian Kewajiban Neto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
3.3.1	Dalam Negeri	-	-	0,00%
3.3.2	Luar Negeri	-	-	0,00%

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024  
DAN 30 SEPTEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan
<b>TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH:</b>				
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>29.136.328.824.921</b>	<b>23.170.814.578.233</b>	<b>25,75%</b>
1.1	Pajak	3.906.589.477.168	3.631.220.609.666	7,58%
1.2	Kontribusi Sosial	-	-	0,00%
1.3	Hibah	23.449.402.711.864	17.672.815.776.699	32,69%
1.4	Pendapatan Lainnya	1.780.336.635.889	1.866.778.191.868	-4,63%
<b>2</b>	<b>Beban</b>	<b>19.969.557.535.616</b>	<b>15.810.676.709.268</b>	<b>26,30%</b>
2.1	Kompensasi Pegawai	7.626.323.739.774	6.672.521.354.622	14,29%
2.2	Penggunaan Barang dan Jasa	6.683.744.225.721	5.165.255.577.607	29,40%
2.3	Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
2.4	Bunga	9.737.133.634	17.061.439.141	-42,93%
2.5	Subsidi	923.353.066	536.027.600	72,26%
2.6	Hibah	4.528.910.479.348	3.292.883.112.885	37,54%
2.7	Manfaat Sosial	120.509.212.800	85.200.718.231	41,44%
2.8	Beban Lainnya	999.409.391.273	577.218.479.182	73,14%
<b>GOB</b>	<b>Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)</b>	<b>9.166.771.289.305</b>	<b>7.360.137.868.965</b>	<b>24,55%</b>
<b>NOB</b>	<b>Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)</b>	<b>9.166.771.289.305</b>	<b>7.360.137.868.965</b>	<b>24,55%</b>
<b>TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Akuisisi Aset Non Keuangan Neto</b>	<b>5.090.459.429.314</b>	<b>2.914.128.072.471</b>	<b>74,68%</b>
3.1.1	Aset Tetap	5.013.229.637.850	2.757.843.330.212	81,78%
3.1.2	Perubahan Persediaan	-	-	0,00%
3.1.3	Barang Berharga	-	-	0,00%
3.1.4	Aset Non Produksi	77.229.791.464	156.284.742.259	-50,58%
<b>NLB</b>	<b>Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)</b>	<b>4.076.311.859.991</b>	<b>4.446.009.796.494</b>	<b>-8,32%</b>
<b>TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN):</b>				
<b>3.2</b>	<b>Akuisisi Neto Aset Keuangan</b>	<b>3.967.899.462.758</b>	<b>4.362.240.048.448</b>	<b>-9,04%</b>
3.2.1	Dalam Negeri	3.967.899.462.758	4.362.240.048.448	-9,04%
3.2.2	Luar Negeri	-	-	0,00%
<b>3.3</b>	<b>Keterjadian Kewajiban Neto</b>	<b>(108.412.397.233)</b>	<b>(83.769.748.046)</b>	<b>-29,42%</b>
3.3.1	Dalam Negeri	(108.412.397.233)	(83.769.748.046)	-29,42%
3.3.2	Luar Negeri	-	-	0,00%

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024  
DAN 30 SEPTEMBER 2023**  
(Dalam Rupiah)

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH:</b>				
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>49.219.637.042.327</b>	<b>45.408.482.365.342</b>	<b>8,39%</b>
1.1	Pajak	16.284.421.160.418	19.056.401.976.373	-14,55%
1.2	Kontribusi Sosial	-	-	0,00%
1.3	Hibah	2.191.457.741.457	1.847.295.886.756	18,63%
1.4	Pendapatan Lainnya	30.743.758.140.452	24.504.784.502.213	25,46%
<b>2</b>	<b>Beban</b>	<b>25.601.180.096.183</b>	<b>20.627.051.148.576</b>	<b>24,11%</b>
2.1	Kompensasi Pegawai	10.735.467.845.351	9.356.204.435.580	14,74%
2.2	Penggunaan Barang dan Jasa	9.135.293.590.859	7.215.089.511.605	26,61%
2.3	Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
2.4	Bunga	9.737.133.634	17.061.439.141	-42,93%
2.5	Subsidi	923.353.066	536.027.600	72,26%
2.6	Hibah	4.311.923.606.648	3.156.213.024.175	36,62%
2.7	Manfaat Sosial	134.841.567.300	96.568.811.674	39,63%
2.8	Beban Lainnya	1.272.992.999.325	785.377.898.801	62,09%
<b>GOB</b>	<b>Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)</b>	<b>23.618.456.946.144</b>	<b>24.781.431.216.766</b>	<b>-4,69%</b>
<b>NOB</b>	<b>Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)</b>	<b>23.618.456.946.144</b>	<b>24.781.431.216.766</b>	<b>-4,69%</b>
<b>TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :</b>				
<b>3.1</b>	<b>Akuisisi Aset Non Keuangan Neto</b>	<b>5.729.152.715.827</b>	<b>3.572.721.213.622</b>	<b>60,36%</b>
3.1.1	Aset Tetap	5.642.608.768.940	3.414.153.478.968	65,27%
3.1.2	Perubahan Persediaan	-	-	0,00%
3.1.3	Barang Berharga	-	-	0,00%
3.1.4	Aset Non Produksi	86.543.946.887	158.567.734.654	-45,42%
<b>NLB</b>	<b>Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)</b>	<b>17.889.304.230.317</b>	<b>21.208.710.003.144</b>	<b>-15,65%</b>
<b>TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN):</b>				
<b>3.2</b>	<b>Akuisisi Neto Aset Keuangan</b>	<b>17.780.891.833.084</b>	<b>21.124.940.255.098</b>	<b>-15,83%</b>
3.2.1	Dalam Negeri	17.780.891.833.084	21.124.940.255.098	-15,83%
3.2.2	Luar Negeri	-	-	0,00%
<b>3.3</b>	<b>Keterjadian Kewajiban Neto</b>	<b>(108.412.397.233)</b>	<b>(83.769.748.046)</b>	<b>-29,42%</b>
3.3.1	Dalam Negeri	(108.412.397.233)	(83.769.748.046)	-29,42%
3.3.2	Luar Negeri	-	-	0,00%

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>6</b>	<b>KEKAYAAN BERSIH</b>	<b>52.240.203.985.284</b>	<b>48.484.882.702.373</b>	<b>7,75%</b>
<b>61</b>	<b>Aset Non Keuangan</b>	<b>48.673.206.773.373</b>	<b>46.472.746.334.696</b>	<b>4,73%</b>
<b>611</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>16.811.418.017.833</b>	<b>15.472.845.890.956</b>	<b>8,65%</b>
6111	Gedung dan Bangunan	14.609.763.987.724	13.600.048.532.516	7,42%
6112	Peralatan dan Mesin	1.582.685.677.301	1.497.596.678.067	5,68%
6113	Aset Tetap Lainnya	618.968.352.808	375.200.680.373	64,97%
<b>612</b>	<b>Persediaan</b>	<b>1.542.672.697.282</b>	<b>1.436.187.935.468</b>	<b>7,41%</b>
<b>614</b>	<b>Aset Non Produksi</b>	<b>30.319.116.058.258</b>	<b>29.563.712.508.272</b>	<b>2,56%</b>
6141	Tanah	30.308.467.038.412	29.557.887.080.147	2,54%
6145	Aset tak Berwujud	10.649.019.846	5.825.428.125	82,80%
<b>62</b>	<b>Aset Keuangan</b>	<b>4.815.824.944.274</b>	<b>3.268.140.104.848</b>	<b>47,36%</b>
6202	Uang dan Deposito	1.564.251.043.590	905.188.428.670	72,81%
6203	Surat Berharga Selain Saham	133.000.000.000	56.000.000.000	137,50%
6204	Pinjaman	-	-	0,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6208	Piutang Lainnya	3.118.573.900.684	2.306.951.676.178	35,18%
<b>621</b>	<b>Aset Keuangan Domestik</b>	<b>4.815.824.944.274</b>	<b>3.268.140.104.848</b>	<b>47,36%</b>
6222	Uang dan Deposito	1.564.251.043.590	905.188.428.670	72,81%
6223	Surat Berharga Selain Saham	133.000.000.000	56.000.000.000	137,50%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6228	Piutang Lainnya	3.118.573.900.684	2.306.951.676.178	35,18%
<b>622</b>	<b>Aset Keuangan Luar Negeri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
6222	Uang dan Deposito	-	-	0,00%
6223	Surat berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6228	Piutang Lainnya	-	-	0,00%
<b>63</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>1.248.827.732.363</b>	<b>1.256.003.737.171</b>	<b>-0,57%</b>
6303	Surat Berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6304	Pinjaman	-	-	0,00%
6308	Utang Lainnya	1.248.827.732.363	1.256.003.737.171	-0,57%
<b>631</b>	<b>Kewajiban Domestik</b>	<b>1.248.827.732.363</b>	<b>1.256.003.737.171</b>	<b>-0,57%</b>
6313	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6314	Pinjaman	-	-	0,00%
6318	Utang Lainnya	1.248.827.732.363	1.256.003.737.171	-0,57%

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>632</b>	<b>Kewajiban Luar Negeri</b>	-	-	<b>0,00%</b>
6323	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6324	Pinjaman	-	-	0,00%
6328	Utang Lainnya	-	-	0,00%

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>6</b>	<b>KEKAYAAN BERSIH</b>	<b>81.414.197.712.628</b>	<b>79.682.100.032.284</b>	<b>2,17%</b>
<b>61</b>	<b>Aset Non Keuangan</b>	<b>68.005.459.416.747</b>	<b>66.977.198.488.465</b>	<b>1,54%</b>
<b>611</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>48.203.716.214.848</b>	<b>47.252.685.078.030</b>	<b>2,01%</b>
6111	Gedung dan Bangunan	35.922.059.184.584	34.771.195.521.869	3,31%
6112	Peralatan dan Mesin	3.239.699.056.077	3.501.969.102.542	-7,49%
6113	Aset Tetap Lainnya	9.041.957.974.187	8.979.520.453.619	0,70%
<b>612</b>	<b>Persediaan</b>	<b>646.134.648.650</b>	<b>646.134.648.650</b>	<b>0,00%</b>
<b>614</b>	<b>Aset Non Produksi</b>	<b>19.155.608.553.249</b>	<b>19.078.378.761.785</b>	<b>0,40%</b>
6141	Tanah	19.154.493.836.699	19.077.264.045.235	0,40%
6145	Aset tak Berwujud	1.114.716.550	1.114.716.550	0,00%
<b>62</b>	<b>Aset Keuangan</b>	<b>15.593.706.027.884</b>	<b>14.998.281.673.055</b>	<b>3,97%</b>
6202	Uang dan Deposito	7.329.541.375.550	7.229.229.839.907	1,39%
6203	Surat Berharga Selain Saham	619.453.134	619.453.134	0,00%
6204	Pinjaman	-	-	0,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lain	5.891.206.977.229	5.396.128.630.558	9,17%
6208	Piutang Lainnya	2.372.338.221.971	2.372.303.749.456	0,00%
<b>621</b>	<b>Aset Keuangan Domestik</b>	<b>15.593.706.027.884</b>	<b>14.998.281.673.055</b>	<b>3,97%</b>
6222	Uang dan Deposito	7.329.541.375.550	7.229.229.839.907	1,39%
6223	Surat Berharga Selain Saham	619.453.134	619.453.134	0,00%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	5.891.206.977.229	5.396.128.630.558	9,17%
6228	Piutang Lainnya	2.372.338.221.971	2.372.303.749.456	0,00%
<b>622</b>	<b>Aset Keuangan Luar Negeri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
6222	Uang dan Deposito	-	-	0,00%
6223	Surat berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6228	Piutang Lainnya	-	-	0,00%
<b>63</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>2.184.967.732.003</b>	<b>2.293.380.129.236</b>	<b>-4,73%</b>
6303	Surat Berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6304	Pinjaman	143.834.115.497	252.246.512.730	-42,98%
6308	Utang Lainnya	2.041.133.616.506	2.041.133.616.506	0,00%
<b>631</b>	<b>Kewajiban Domestik</b>	<b>2.184.967.732.003</b>	<b>2.293.380.129.236</b>	<b>-4,73%</b>
6313	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6314	Pinjaman	143.834.115.497	252.246.512.730	-42,98%
6318	Utang Lainnya	2.041.133.616.506	2.041.133.616.506	0,00%

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>632</b>	<b>Kewajiban Luar Negeri</b>	-	-	<b>0,00%</b>
6323	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6324	Pinjaman	-	-	0,00%
6328	Utang Lainnya	-	-	0,00%

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023  
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>6</b>	<b>KEKAYAAN BERSIH</b>	<b>133.654.401.697.912</b>	<b>128.166.982.734.657</b>	<b>4,28%</b>
<b>61</b>	<b>Aset Non Keuangan</b>	<b>116.678.666.190.120</b>	<b>113.449.944.823.161</b>	<b>2,85%</b>
<b>611</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>65.015.134.232.681</b>	<b>62.725.530.968.986</b>	<b>3,65%</b>
6111	Gedung dan Bangunan	50.531.823.172.308	48.371.244.054.385	4,47%
6112	Peralatan dan Mesin	4.822.384.733.378	4.999.565.780.609	-3,54%
6113	Aset Tetap Lainnya	9.660.926.326.995	9.354.721.133.992	3,27%
<b>612</b>	<b>Persediaan</b>	<b>2.188.807.345.932</b>	<b>2.082.322.584.118</b>	<b>5,11%</b>
<b>614</b>	<b>Aset Non Produksi</b>	<b>49.474.724.611.507</b>	<b>48.642.091.270.057</b>	<b>1,71%</b>
6141	Tanah	49.462.960.875.111	48.635.151.125.382	1,70%
6145	Aset tak Berwujud	11.763.736.396	6.940.144.675	69,50%
<b>62</b>	<b>Aset Keuangan</b>	<b>19.758.961.231.584</b>	<b>17.615.852.037.329</b>	<b>12,17%</b>
6202	Uang dan Deposito	8.893.792.419.140	8.134.418.268.577	9,34%
6203	Surat Berharga Selain Saham	133.619.453.134	56.619.453.134	136,00%
6204	Pinjaman	-	-	0,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lain	5.891.206.977.229	5.396.128.630.558	9,17%
6208	Piutang Lainnya	4.840.342.382.081	4.028.685.685.060	20,15%
<b>621</b>	<b>Aset Keuangan Domestik</b>	<b>19.758.961.231.584</b>	<b>17.615.852.037.329</b>	<b>12,17%</b>
6222	Uang dan Deposito	8.893.792.419.140	8.134.418.268.577	9,34%
6223	Surat Berharga Selain Saham	133.619.453.134	56.619.453.134	136,00%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	5.891.206.977.229	5.396.128.630.558	9,17%
6228	Piutang Lainnya	4.840.342.382.081	4.028.685.685.060	20,15%
<b>622</b>	<b>Aset Keuangan Luar Negeri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
6222	Uang dan Deposito	-	-	0,00%
6223	Surat berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6228	Piutang Lainnya	-	-	0,00%
<b>63</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>2.783.225.723.792</b>	<b>2.898.814.125.833</b>	<b>-3,99%</b>
6303	Surat Berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6304	Pinjaman	143.834.115.497	252.246.512.730	-42,98%
6308	Utang Lainnya	2.639.391.608.295	2.646.567.613.103	-0,27%
<b>631</b>	<b>Kewajiban Domestik</b>	<b>2.783.225.723.792</b>	<b>2.898.814.125.833</b>	<b>-3,99%</b>
6313	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6314	Pinjaman	143.834.115.497	252.246.512.730	-42,98%
6318	Utang Lainnya	2.639.391.608.295	2.646.567.613.103	-0,27%

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah  
Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	30 September 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
<b>632</b>	<b>Kewajiban Luar Negeri</b>	-	-	<b>0,00%</b>
6323	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6324	Pinjaman	-	-	0,00%
6328	Utang Lainnya	-	-	0,00%

## METADATA

### A. Informasi Data

Nama Data	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah
Penyelenggara Statistik	: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat	: Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No.24 Banjarmasin
Nomor Telepon	: (0511) 3354224, 3354226, 3351563
Nomor Faksimili	: (0511) 3354834
Email	: aklapbjm@gmail.com

### B. Definisi Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan Laporan Statistik Keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts-SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah-Tingkat Wilayah (LSKP-TW) ini merupakan konsolidasi dari kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah-Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat tingkat wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah.

LSKP-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan
  2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan
  3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah\*
  4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya\*
  5. Metadata
- \*) Penyusunan GFS Tahunan

### C. Cakupan Data

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan akun skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

#### D. Periode Publikasi

Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan. Publikasi ini merupakan publikasi Triwulan III Tahun 2024.

#### E. Waktu Publikasi

1. Data Triwulanan dan Semesteran diterbitkan satu bulan setelah berakhirnya periode data.
2. Data Tahunan *Unaudited* diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya.
3. Data Tahunan Final (*Audited*) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

#### F. Status Data

1. Status Angka Sangat Sementara dengan tanda dua bintang (\*\*) diberikan apabila:
  - a. LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang disusun menggunakan angka estimasi.
2. Status Angka Sangat Sementara dengan tanda satu bintang (\*) diberikan apabila:
  - a. LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang telah dilakukan *updating*.
  - b. LSKP-TW Tahunan dengan data *unaudited*.
  - c. LSKP-TW Tahunan yang belum seluruhnya disusun dengan data *audited*.
3. LSKP-TW Tahunan berstatus angka tetap (tanpa tanda bintang) apabila telah seluruhnya disusun menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit.

#### G. Sumber Data

1. Kertas kerja LSKPP-TW dan kertas kerja LSKPDK-TW di-*download* dari Aplikasi SIKRI MP dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Penyusunan LO LSKP data Table GFS 1 (*Revenue*), Table GFS 2 (*Expense*), dan Tabel GFS 3 (*Transactions in Assets in Liabilities*). Terdapat penyesuaian pada Table GFS 3 yaitu dengan menghapus eliminasi pada *Currency and Deposits* (3212)
  - b. Penyusunan Neraca LSKP menggunakan Table GFS 6 (*Balance Sheet*)
2. Kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW diunduh dari Aplikasi SIKRI MP per tanggal 18 Juli 2024. Penyusunan LO LKPDK dan Neraca LKPDK dilakukan dengan melakukan estimasi dari data LRA tahun berjalan dan Neraca TAYL.
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per objek Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024 diperoleh langsung dari Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja LRA per fungsi didapatkan langsung dari Pemerintah Daerah dan estimasi. Estimasi realisasi Belanja LRA per fungsi dilakukan terhadap pemda yang belum dapat menghasilkan LRA per fungsi karena aplikasi pelaporan yang belum mengakomodasi penyusunan laporan tersebut. Adapun rincian sumber data LRA LKPD yang digunakan dalam penyusunan GFS Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Kode	Pemerintah Daerah	Sumber Data	
			LRA per Objek	LRA per Fungsi
1	1500	Provinsi Kalimantan Selatan	Pemda	Estimasi
2	1501	Kab Banjar	Pemda	Pemda
3	1502	Kab Tanah Laut	Pemda	Pemda

No.	Kode	Pemerintah Daerah	Sumber Data	
			LRA per Objek	LRA per Fungsi
4	1503	Kab Tapin	Pemda	Pemda
5	1504	Kab Hulu Sungai Selatan	Pemda	Pemda
6	1505	Kab Hulu Sungai Tengah	Pemda	Estimasi
7	1506	Kab Barito Kuala	Pemda	Pemda
8	1507	Kab Tabalong	Pemda	Pemda
9	1508	Kab Kotabaru	Pemda	Estimasi
10	1509	Kab Hulu Sungai Utara	Pemda	Pemda
11	1510	Kab Tanah Bumbu	Pemda	Estimasi
12	1511	Kab Balangan	Pemda	Pemda
13	1551	Kota Banjarmasin	Pemda	Pemda
14	1552	Kota Banjarbaru	Pemda	Pemda

## H. Metodologi

LSKP-TW disusun dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW. LSKPPTW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan *mapping* BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW menggunakan Kertas Kerja *Classification Assistance* yang berupa kertas kerja Ms. Excel yang menyediakan kerangka *mapping* masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Eliminasi atas transaksi resipikal melalui jurnal manual yang diunggah melalui WebADI pada SIKRI MP. Aplikasi SIKRI MP akan secara otomatis melakukan penyusunan LSKP-TW dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW ke dalam GFS *Table* sesuai dengan kerangka *mapping* masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu.

1. Penyusunan kertas kerja LSKPP-TW melalui *mapping* BAS detail data LKPP-TW.
2. Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW, melalui *mapping* BAS detail data LKPDK-TW.
3. Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi LSKP-TW.

## I. Integritas Data

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Triwulan III Tahun 2024 diperoleh dari Aplikasi SIKRI MP. Data Laporan Keuangan terdiri dari 553 UAKPA yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (sumber: MonSAKTI).
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Triwulan III Tahun 2024 dilakukan proses konsolidasi terhadap 14 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

## J. Akses Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan D. I. Panjaitan Nomor 24 Banjarmasin. Sementara itu, Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.

## ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2024

### A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

#### 1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio solvabilitas jangka pendek pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada 30 September 2024 adalah sebesar 583,79% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi setiap Rp100 kewajiban jangka pendeknya dijamin dengan Rp583 aset lancar. Apabila dibandingkan dengan 31 Desember Tahun 2023, rasio solvabilitas adalah sebesar 473,63%. Peningkatan tingkat rasio solvabilitas jangka pendek lingkup wilayah Kalimantan Selatan terjadi pada Pemerintah Daerah yang disebabkan adanya peningkatan nilai aset lancar seiring dengan penurunan nilai kewajiban jangka pendek. Seluruh Pemda lingkup Kalimantan Selatan memiliki rasio solvabilitas jangka pendek di atas 100%. Dengan demikian, seluruh Pemerintah Daerah mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan satu periode anggaran.
2.	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio solvabilitas jangka panjang pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada 30 September 2024 adalah sebesar 39.837,92% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi setiap Rp100 Kewajiban Jangka Panjang dijamin dengan Rp39.837 aset. Kewajiban Jangka Panjang per 30 September 2024 lingkup wilayah Kalimantan Selatan hanya terdapat pada Pemkab Tapin sebesar Rp5.883.116.989 dan Pemkab Tabalong sebesar Rp46.776.360.379.

#### 2. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 19,38% dan 23,59%. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat masih termasuk kategori kurang (<i>range</i> 10% s.d. 20%). Pemerintah perlu mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang merupakan komponen utama pembentuk PAD. Penurunan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Triwulan III Tahun 2024 juga disebabkan karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tidak sebesar peningkatan Pendapatan Transfer. Pajak Daerah menjadi kontributor terbesar PAD pada Triwulan III Tahun 2024.</p> <p>Berdasarkan kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah, pada Triwulan III Tahun 2024 dan 2023, tingkat kemandirian daerah masuk dalam kategori "kurang" (<i>range</i> 10% s.d. 20%) dan "sedang" (<i>range</i> 20% s.d. 30%). Pada Triwulan III Tahun 2024, terdapat 7 pemda dengan rasio kemandirian keuangan</p>

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		<p>daerah kategori “sangat kurang”, 5 pemda dengan rasio kemandirian keuangan daerah “kurang”, 1 pemda dengan rasio kemandirian daerah kategori “sedang”, dan 1 pemda dengan rasio kemandirian keuangan daerah kategori “baik”.</p> <p>Pemda dengan kategori “baik” (<i>range</i> &gt;50%) adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan oleh PAD Provinsi Kalimantan Selatan yang tinggi karena ditopang oleh jenis pajak yang memiliki volume dan nilai transaksi besar yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</p>
2.	Rasio Solvabilitas Anggaran	<p>Rasio Solvabilitas Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 137,89% dan 137,35%. Hal tersebut mencerminkan bahwa Pendapatan Pemerintah Daerah mampu menutupi belanja Pemerintah selama periode anggaran. Peningkatan tipis Rasio Solvabilitas Anggaran disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Daerah setelah dikurangi Pendapatan Transfer DAK pada Triwulan III Tahun 2024.</p> <p>Peningkatan PAD pada Triwulan III Tahun 2024 utamanya disumbang oleh Pajak Daerah di tingkat provinsi dan Pajak Penerangan Jalan untuk di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan upaya optimalisasi pendapatan, khususnya Pajak Daerah sehingga dapat memperkecil tingkat ketergantungan pada pendapatan transfer. Sebagai catatan, bahwa nilai pendapatan adalah pendapatan sebelum dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.</p> <p>Rasio Solvabilitas Anggaran pada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024 memiliki nilai lebih dari 100%, kecuali Kab. Barito Kuala sebesar 94,50%.</p>
3.	Rasio Solvabilitas Layanan	<p>Rasio Solvabilitas Layanan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2024 menunjukkan angka 10.070.416. Artinya, untuk setiap kebutuhan pelayanan menurut fungsi dan jenis pelayanan yang akan diterima per 1 orang penduduk di wilayah layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dipenuhi atau dijamin dengan nilai aset yang digunakan untuk pelayanan publik senilai Rp10.070.416. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menyediakan fasilitas atau proses pelayanan publik yang setara dengan nilai aset Pemda sebesar Rp10.070.416 untuk setiap penduduk yang ada di wilayah layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rasio Solvabilitas Layanan Triwulan III Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 9.003.156. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai aset pemerintah daerah, sementara jumlah penduduk yang dilayani relatif sama dengan tahun sebelumnya.</p>
4.	Rasio Solvabilitas Operasional	<p>Rasio Solvabilitas Operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 130,18% dan 162,34%. Hal tersebut mencerminkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2024, pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah telah mampu menutupi belanja operasional.</p> <p>Penurunan Rasio Solvabilitas Operasional pada Triwulan III Tahun 2024 terjadi penurunan karena terdapat peningkatan beban LO lebih besar daripada</p>

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		<p>peningkatan pendapatan LO. Sebagai catatan, nilai pendapatan adalah pendapatan sebelum dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.</p> <p>Seluruh pemda lingkup Kalimantan Selatan memiliki nilai Solvabilitas Operasional di atas 100% pada Triwulan III Tahun 2024, kecuali Pemkab. Barito Kuala 75,85%.</p>
5.	Rasio Fleksibilitas Keuangan	<p>Rasio Fleksibilitas Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 29,49% dan 60,90%. Nilai Rasio Fleksibilitas Keuangan yang bernilai positif pada Triwulan III Tahun 2024 mencerminkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan setelah dikurangi DAK telah mencukupi untuk pembayaran beban operasional dan pembayaran pokok kewajiban.</p> <p>Terdapat 1 (satu) Pemerintah Daerah yang memiliki nilai Rasio Fleksibilitas Keuangan negatif, yaitu Pemkab Barito Kuala dengan rasio fleksibilitas keuangan sebesar minus 24,15%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah setelah dikurangi dengan pendapatan DAK belum mencukupi untuk pembayaran beban operasional. Optimalisasi PAD perlu menjadi fokus utama Pemerintah Daerah untuk kesinambungan fiskal yang terjaga, utamanya dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang mempengaruhi penerimaan utama dari sebagian besar pemda di Kalimantan Selatan, yaitu sumber daya alam berupa baru bara dan sawit.</p> <p>Sebagai catatan, nilai pendapatan adalah pendapatan sebelum dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.</p>

## B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

### 1. Analisis Keseimbangan Fiskal

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Keseimbangan Operasi Neto ( <i>Net Operating Balance</i> )	<p>Kekayaan selama transaksi berjalan menunjukkan nilai positif sebesar Rp23.618.456.946.145. Nilai Keseimbangan Operasi Neto mengalami penurunan tipis sebesar Rp1.162.974.270.621 atau 4,69% dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar Rp24.781.431.216.766.</p> <p>Penurunan keseimbangan operasi neto tersebut terjadi pada seluruh tingkatan pemerintah. Kondisi tersebut terjadi karena peningkatan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan peningkatan beban yang signifikan.</p>
2.	Keseimbangan Operasi Bruto ( <i>Gross Operating Balance</i> )	<p>Nilai Keseimbangan Operasi Bruto pada LO Statistik Triwulan III Tahun 2024 sama dengan nilai Keseimbangan Operasi Neto. Nilai NOB mencakup semua beban, sedangkan nilai GOB tidak memperhitungkan Konsumsi Aset Tetap. Namun, saat ini komponen pembentuk Laporan Operasional Statistik adalah Laporan Realisasi Anggaran sehingga tidak mencatat konsumsi aset tetap.</p>
3.	Peminjaman/Pinjaman Neto ( <i>Net Lending/Borrowing</i> )	<p>Nilai <i>Net Lending</i> Triwulan III Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp17.889.304.230.318. Nilai <i>Net Lending</i> tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.319.405.772.826 atau 15,65% dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar</p>

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		Rp21.208.710.003.144. Penurunan nilai <i>Net Lending</i> dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada seluruh tingkatan pemerintahan.  <i>Net Lending</i> menggambarkan seberapa besar sumber daya finansial yang mampu disalurkan maupun diperoleh dari sektor ekonomi lain (pembiayaan). Nilai <i>Net Lending</i> pada seluruh tingkatan pemerintahan dilakukan optimalisasi melalui pembiayaan yaitu melalui Akuisisi Aset Keuangan Neto sebesar Rp17.780.891.833.084 dan membayar pokok pinjaman (Keterjadian Kewajiban Neto) sebesar Rp108.412.397.233.
4.	Keseimbangan Operasi Primer ( <i>Primary Operating Balance</i> )	Nilai Keseimbangan Operasi Primer Triwulan III Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp24.798.492.655.907. Nilai positif terjadi pada seluruh tingkatan pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsolidasian mampu membiayai seluruh beban operasi sehingga kesinambungan fiskal akan selalu terjaga.
5.	Keseimbangan Primer ( <i>Primary Balance</i> )	Nilai Keseimbangan Primer Triwulan III Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp21.225.771.442.285. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah mampu membiayai seluruh pengeluaran dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas <i>interest expense</i> tanpa menimbulkan utang yang baru.

## 2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Pajak Langsung ( <i>Direct Taxes</i> )	Pajak Langsung ( <i>Direct Taxes</i> ) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp6.237.895.263.131. Pajak Langsung sebagian besar berupa <i>Taxes on income, profits, and capital gain</i> atau Pajak Penghasilan yang pemungutannya merupakan kewenangan pada Pemerintah Pusat. Pajak Langsung Lainnya yang mengalami peningkatan adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi.  Pajak Langsung ( <i>Direct Taxes</i> ) mengalami penurunan pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp2.477.359.208.996 atau 28,43 % dibanding Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.715.254.472.127.
2.	Pajak Tidak Langsung ( <i>Indirect Taxes</i> )	Pajak Tidak Langsung ( <i>Indirect Taxes</i> ) pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp9.883.464.428.236. Pajak Tidak Langsung mengalami penurunan sebesar Rp309.991.858.513 atau 3,04 % dibandingkan Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar Rp10.193.456.286.749. Pajak Tidak Langsung ( <i>Indirect Taxes</i> ) sebagian besar berupa <i>Taxes on Good Services</i> yaitu mencapai 96,94% dari total Pajak Tidak Langsung.  Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Pusat didominasi oleh PPN Dalam Negeri, pada Pemerintah Provinsi didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak pada Pemkab/Pemkot didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan. Pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan seiring dengan penerapan tarif PPN 11%. Capaian pajak yang tumbuh tersebut menunjukkan adanya sinyal positif peningkatan konsumsi masyarakat.
3.	Pajak Modal ( <i>Capital Taxes</i> )	Pajak Modal ( <i>Capital Taxes</i> ) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp163.061.469.051 yang mengalami peningkatan sebesar Rp15.370.251.554 atau 10,41% dibandingkan Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar Rp147.691.217.497. Pajak Modal ( <i>Capital Taxes</i> ) hanya terdapat pada

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		Pemkab/Pemkot yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4.	Belanja Konsumsi Final Pemerintah ( <i>Government Final Consumption Expenditure</i> )	Belanja Konsumsi Final Pemerintah pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp18.673.678.357.157 yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.744.506.973.947 atau 25,08 % dibandingkan Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar Rp14.929.171.383.210.  Apabila melihat komponen pembentuk Belanja Konsumsi Final Pemerintah, peningkatan terbesar ada pada komponen <i>Sales of Goods and Services</i> . Peningkatan <i>Sales of Goods and Services</i> terjadi karena meningkatnya Belanja Barang Jasa di seluruh tingkatan pemerintahan, kecuali pemerintah provinsi.
5.	Tabungan Bruto ( <i>Gross Saving</i> )	Tabungan Bruto ( <i>Gross Saving</i> ) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp23.635.822.367.778 yang mengalami penurunan sebesar Rp1.144.825.055.944 atau 23,73 % dibandingkan Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar Rp24.780.647.423.722. Hal tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan sisa Tabungan Bruto yang dapat dialokasikan pada investasi melalui optimalisasi pembiayaan.

### 3. Analisis Indikator Pembiayaan

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Total Pembiayaan ( <i>Total Financing</i> )	Total Pembiayaan ( <i>Total Financing</i> ) atau <i>Net Lending</i> Triwulan III Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp17.889.304.230.318. Dengan demikian, nilai <i>Total Financing</i> mengalami penurunan sebesar Rp3.319.405.772.826 atau 15,65% dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar Rp21.208.710.003.144. Penurunan nilai Total Pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada seluruh tingkatan pemerintahan, kecuali kabupaten/kota.  <i>Total Financing</i> tersebut pada seluruh tingkatan pemerintahan dilakukan optimalisasi melalui pembiayaan, yaitu melalui Akuisisi Aset Keuangan Neto sebesar Rp17.780.891.833.084 dan Keterjadian Kewajiban Neto sebesar minus Rp108.412.397.233. Nilai Keterjadian Neto yang minus menunjukkan pembayaran pokok pinjaman.
2.	Pembiayaan Dalam Negeri ( <i>Domestic Financing</i> )	Pembiayaan Dalam Negeri ( <i>Domestic Financing</i> ) merupakan bentuk dari upaya optimalisasi <i>Net Lending (Net Borrowing)</i> . Pada Triwulan III Tahun 2024, <i>Net Lending</i> sebesar Rp17.889.304.230.318 merupakan Transaksi Aset Keuangan dengan unit institusi residen dikurangi kewajiban dengan unit institusi residen yang seluruhnya bersumber dari debitur/kreditur dalam negeri.
3.	Pembiayaan Luar Negeri ( <i>Foreign Financing</i> )	Seluruh pembiayaan yang terjadi pada wilayah Kalimantan Selatan merupakan Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri. Pembiayaan melalui luar negeri hanya dilakukan pada level BA-BUN yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah.

### 4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Utang Bruto ( <i>Gross Debt</i> )	Jumlah Utang Bruto ( <i>Gross Debt</i> ) pada wilayah Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp3.433.795.464.366. Utang tersebut terdapat pada seluruh tingkatan

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		pemerintah dengan nilai terbesar pada tingkatan kabupaten/kota. Sebagian besar Utang Bruto ( <i>Gross Debt</i> ) berupa kewajiban jangka pendek.
2.	Utang Neto ( <i>Net Debt</i> )	Nilai Utang Neto ( <i>Net Debt</i> ) pada wilayah Kalimantan Selatan sama dengan nilai Utang Bruto ( <i>Gross Debt</i> ), karena pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki aset berupa <i>Monetary Gold &amp; Special Drawings</i> . LSKP yang disusun pada level wilayah Kalimantan Selatan saat ini hanya mencakup lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan tidak termasuk korporasi. Sebagai informasi tambahan bahwa <i>Monetary Gold</i> merupakan emas yang dimiliki dan disimpan sebagai aset cadangan oleh otoritas moneter (Bank Indonesia), sedangkan <i>Special Drawings</i> merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasikan kepada negara anggotanya untuk melengkapi aset cadangan.

### C. Lampiran

#### 1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

##### a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
<b>Rasio Solvabilitas Jangka Pendek</b>	<b>583,79%</b>	<b>473,63%</b>
Aset Lancar	14.270.740.639.985	12.018.781.100.007
Kewajiban Jangka Pendek	2.444.498.277.870	2.537.596.712.562
<b>Rasio Solvabilitas Jangka Panjang</b>	<b>39.837,92%</b>	<b>35.859,38%</b>
Total Aset	134.941.961.811.656	129.530.330.388.826
Kewajiban Jangka Panjang	338.727.445.923	361.217.413.271

##### b. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No	Pemerintah Prov/Kab/Kota	Rasio									
		Kemandirian Keuangan Daerah		Solvabilitas Anggaran		Solvabilitas Layanan		Solvabilitas Operasional		Fleksibilitas Keuangan	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	Kalimantan Selatan	47,28%	50,82%	133,11%	141,48%	5.551.866	5.400.820	156,61%	204,32%	56,61%	104,32%
2	Kab. Banjar	11,13%	11,52%	123,92%	137,54%	7.382.268	6.639.941	113,54%	156,25%	13,54%	56,25%
3	Kab. Tanah Laut	9,31%	9,12%	129,80%	131,01%	15.863.829	14.887.828	120,26%	149,28%	20,26%	49,28%
4	Kab. Tapin	4,88%	7,71%	158,64%	107,38%	19.055.508	13.765.938	133,51%	117,55%	28,94%	10,37%
5	Kab. Hulu Sungai Selatan	11,85%	13,63%	131,66%	117,80%	16.877.340	15.731.282	119,96%	128,96%	19,96%	28,96%
6	Kab. Hulu Sungai Tengah	11,34%	13,12%	127,98%	123,44%	10.767.198	9.283.664	107,07%	132,16%	7,07%	32,16%
7	Kab. Barito Kuala	4,45%	6,06%	94,50%	86,85%	8.180.924	7.102.013	75,85%	95,10%	-24,15%	-4,90%
8	Kab. Tabalong	11,12%	12,26%	123,17%	148,24%	21.926.132	20.198.547	109,73%	162,39%	8,15%	60,98%
9	Kab. Kotabaru	7,69%	9,12%	126,88%	153,87%	16.719.961	16.527.149	101,28%	172,54%	1,28%	72,54%
10	Kab. Hulu Sungai Utara	9,14%	12,12%	121,59%	113,42%	13.566.652	11.858.814	110,38%	129,16%	4,35%	15,27%
11	Kab. Tanah Bumbu	6,35%	10,57%	202,93%	174,46%	23.372.277	16.247.613	188,96%	201,40%	88,96%	101,40%
12	Kab. Balangan	3,97%	4,24%	156,94%	203,77%	39.793.331	32.305.068	158,83%	233,59%	58,83%	133,59%
13	Kota Banjarmasin	20,09%	25,71%	150,01%	114,45%	10.536.779	9.202.270	119,12%	111,50%	19,12%	11,50%
14	Kota Banjarbaru	17,22%	29,57%	128,29%	123,36%	12.394.495	11.275.333	88,48%	119,82%	-11,52%	19,82%
	<b>Total</b>	<b>19,38%</b>	<b>23,59%</b>	<b>137,89%</b>	<b>137,35%</b>	<b>10.070.416</b>	<b>9.003.156</b>	<b>130,18%</b>	<b>162,34%</b>	<b>29,49%</b>	<b>60,90%</b>

## 2. Perhitungan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

### a. Analisis Keseimbangan Fiskal

#### Analisis Keseimbangan Fiskal Triwulan III Tahun 2024

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	14.451.685.656.840	14.451.685.656.840	13.812.992.370.327	14.451.685.656.840	13.812.992.370.327
2	Pemerintah Provinsi	2.207.799.243.544	2.207.799.243.544	400.111.996.435	2.207.799.243.544	400.111.996.435
3	Pemerintah Kab/Kota	6.958.972.045.761	6.958.972.045.761	3.676.199.863.556	6.968.709.179.395	3.685.936.997.190
4	Pemerintah Umum	23.618.456.946.145	23.618.456.946.145	17.889.304.230.318	23.628.194.079.779	17.899.041.363.952

#### Analisis Keseimbangan Fiskal Triwulan III Tahun 2023

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	17.421.293.347.801	17.421.293.347.801	16.762.700.206.650	17.421.293.347.801	16.762.700.206.650
2	Pemerintah Provinsi	2.275.381.931.833	2.275.381.931.833	1.489.311.086.410	2.275.381.931.833	1.489.311.086.410
3	Pemerintah Kab/Kota	5.084.755.937.132	5.084.755.937.132	2.956.698.710.084	5.101.817.376.273	2.973.760.149.225
4	Pemerintah Umum	24.781.431.216.766	24.781.431.216.766	21.208.710.003.144	24.798.492.655.907	21.225.771.442.285

### b. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

#### Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya Triwulan III Tahun 2024

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	6.150.954.354.682	6.226.877.328.568	-	4.523.100.466.567	14.632.112.547.524
2	Pemerintah Provinsi	-	3.108.265.465.861	-	3.145.837.499.958	2.207.799.243.544
3	Pemerintah Kab/Kota	86.940.908.449	548.321.633.807	163.061.469.051	11.004.740.390.632	6.795.910.576.710
4	Pemerintah Umum	6.237.895.263.131	9.883.464.428.236	163.061.469.051	18.673.678.357.157	23.635.822.367.778

#### Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya Triwulan III Tahun 2023

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	8.636.910.847.158	6.788.270.519.549	-	3.718.377.585.142	17.568.200.772.254
2	Pemerintah Provinsi	-	2.906.037.064.629	-	2.616.203.319.329	2.275.381.931.833
3	Pemerintah Kab/Kota	78.343.624.969	499.148.702.571	147.691.217.497	8.594.590.478.739	4.937.064.719.635
4	Pemerintah Umum	8.715.254.472.127	10.193.456.286.749	147.691.217.497	14.929.171.383.210	24.780.647.423.722

**c. Analisis Indikator Pembiayaan**

*Analisis Indikator Pembiayaan Triwulan III Tahun 2024*

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	13.812.992.370.327	13.812.992.370.327	-	-	-
2	Pemerintah Provinsi	400.111.996.435	400.111.996.435	-	-	-
3	Pemerintah Kab/Kota	3.676.199.863.556	3.676.199.863.556	-	-	-
4	Pemerintah Umum	17.889.304.230.318	17.889.304.230.318	-	-	-

*Analisis Indikator Pembiayaan Triwulan III Tahun 2023*

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	16.762.700.206.650	16.762.700.206.650	-	-	-
2	Pemerintah Provinsi	1.489.311.086.410	1.489.311.086.410	-	-	-
3	Pemerintah Kab/Kota	2.956.698.710.084	2.956.698.710.084	-	-	-
4	Pemerintah Umum	21.208.710.003.144	21.208.710.003.144	-	-	-

**d. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang**

*Analisis Indikator Kekayaan dan Utang 30 September 2024*

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	1.248.827.732.363	1.248.827.732.363
2	Pemerintah Provinsi	790.775.158.690	790.775.158.690
3	Pemerintah Kab/Kota	1.394.192.573.313	1.394.192.573.313
4	Pemerintah Umum	3.433.795.464.366	3.433.795.464.366

*Analisis Indikator Kekayaan dan Utang 31 Desember 2023*

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	1.038.421.851.810	1.038.421.851.810
2	Pemerintah Provinsi	1.562.652.895.281	1.562.652.895.281
3	Pemerintah Kab/Kota	1.371.933.966.341	1.371.933.966.341
4	Pemerintah Umum	3.973.008.713.432	3.973.008.713.432



Ditandatangani secara elektronik  
Syafriadi

# GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

LAPORAN GFS STRATEGIS  
TINGKAT WILAYAH

TRIWULAN III TAHUN 2024

KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

